



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



2025

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

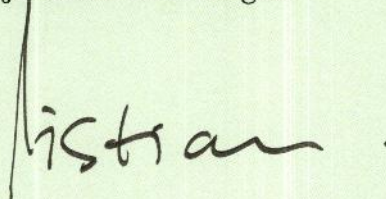
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri 2025 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri(HKLN) selaku penanggungjawab kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan serta Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri. LKJ Biro HKLN disusun dengan fokus pencapaian target fisik sesuai dalam dokumen rencana kerja tahun 2025 maupun penggunaan anggaran DIPA BA-143 tahun 2025.

LKJ Biro HKLN tahun 2025 ini disusun secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh bagian di Biro HKLN. Hal ini mengingat pentingnya peran dokumen LKJ dalam kerangka perencanaan kegiatan dan penganggaran, serta untuk kesinambungan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Kami mengharapkan LKJ Biro HKLN Tahun 2025 ini dapat dimanfaatkan dengan baik, dan menjadi bahan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2026. Perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pelaporan kegiatan akan terus dilakukan, seiring dengan visi menjadikan Biro HKLN menjadi organisasi pembelajar (learning organization).

Jakarta, Januari 2026
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Kerja Sama Luar Negeri



Dr. Ristiano Pribadi, S.Hut., M.Tourism
NIP. 19791125 20005 1 006



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur Organisasi.....	7
1.3. Sumber Daya Manusia.....	9
1.4. Sarana Prasarana.....	11
1.5. Isu Strategis 2025.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perjanjian Kinerja 2025.....	15
2.2. Pohon Kinerja Biro HKLN.....	17
2.3. Rencana Alokasi Anggaran.....	18



BAB III CAPAIAN KINERJA

3.1. Capaian Kinerja.....	21
3.1.1. Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri.....	25
3.1.2. Pemberitaan Positif Media Massa.....	43
3.1.3. Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Kehutanan.....	47
3.2. Capaian Kinerja Lainnya.....	76
3.2.1. Kearsipan.....	76
3.2.2. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kinerja Anggaran.....	77
3.2.3. Benchmarking.....	78
 BAB IV PENUTUP.....	 80
LAMPIRAN.....	81



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Isu kehutanan merupakan isu kehidupan sehari-hari dan menjadi atensi publik. Selain itu, masalah mengemuka setiap waktu dan respon berbagai lapisan masyarakat dan para pihak cukup intens. Terlebih di era digital 4.0 dimana kemajuan teknologi informasi melalui berbagai *platform/device* menjadi salah satu sumber utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Diperlukan peningkatan pelaksanaan komunikasi dan layanan informasi publik melalui rencana strategi yang terukur serta pengelolaan secara efektif dan efisien untuk dapat merespon umpan balik dari masyarakat terhadap program dan keberhasilan maupun sejumlah kelemahan yang mesti ditingkatkan oleh Pemerintah.

Selain dari komunikasi dan informasi, pelaksanaan kerja sama dalam mengatasi isu kehutanan merupakan bagian penting dari kesuksesan program Pemerintah. Secara inheren, isu-isu kehutanan seperti deforestasi, kebakaran hutan, maupun *carbon market* merupakan isu yang bersifat transnasional. Kompleksitas dan skala permasalahan ini meniscayakan bahwa tidak ada satu negara pun, termasuk Indonesia, yang mampu mengatasinya secara unilateral. Oleh karena itu, kerja sama luar negeri menjadi sebuah imperatif strategis, bukan sekadar pilihan, bagi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam menjalankan mandatnya.



Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) sebagai satuan kerja yang mengelola komunikasi, mengelola layanan informasi publik, serta memfasilitasi kegiatan kerja sama luar negeri Kemenhut memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyebarluasan informasi pembangunan kehutanan serta menjalankan kerja sama dengan mitra internasional baik bilateral maupun multilateral terkait isu kehutanan. Perubahan sudut pandang di kalangan masyarakat terhadap berbagai isu kehutanan serta terciptanya jalinan kerja sama internasional menjadi salah satu tujuan utama pembangunan kehutanan.



Untuk itu, Biro HKLN dalam penyebarluasan informasi perlu memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui, memahami dan pada akhirnya berkontribusi secara aktif dalam mendukung berbagai program dan kebijakan Kemenhut. Di era keterbukaan informasi publik sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Biro HKLN selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kemenhut harus meningkatkan efektivitas komunikasi dan layanan informasi publik dengan menjalankan konsep *sendung* dan *delivering* sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri perlu membangun mekanisme umpan balik yang tersistem yang mampu menggambarkan persoalan, sehingga strategi komunikasi publik Kemenhut dapat menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian target-target kinerja program Kemenhut.

Selain hubungan masyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri bidang kehutanan, Biro HKLN merujuk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain konstitusi dasar yakni UUD 1945 yang melandasi semua kegiatan berbangsa dan bernegara, dasar hukum kerja sama luar negeri sektor LHK antara lain Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengatur antara lain penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Sebagaimana dimandatkan oleh Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), dan SK Menhut Nomor 975 Tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro HKLN) sebagai satuan kerja pemerintah di bawah Sekretariat Jenderal Kemenhut wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pokok penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Biro HKLN Tahun 2025 disusun untuk menggambarkan ikhtisar kinerja Biro HKLN sepanjang tahun 2025 yang mencakup capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan Kinerja Biro HKLN dibuat dengan menyajikan informasi tentang hal-hal yang berhasil dilakukan sebagai bentuk pencapaian dari rencana, tindakan, dan kegiatan yang menjadi implementasi perjanjian kinerja Kepala Biro HKLN untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional sebagaimana tujuan dari program reformasi birokrasi.

Laporan Kinerja Biro HKLN Tahun 2025 memberi gambaran tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja unit kerja Biro HKLN. Laporan Kinerja Biro HKLN dimaksudkan sebagai wujud nyata dari komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja ASN lingkup Biro HKLN. Laporan Kinerja Biro HKLN juga menjadi tolak ukur kinerja yang mendasari evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai





Melaksanakan pengelolaan kehumasan, pemberitaan, publikasi, informasi publik, hubungan antar lembaga, hubungan dan kerja sama luar negeri, layanan keprotokolan, serta fasilitasi kegiatan dan administrasi atase kehutanan.

TUGAS

TUGAS & FUNGSI BIRO HKLN



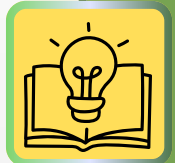
Penyiapan koordinasi kehumasan, strategi komunikasi, pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri;

Pelaksanaan pengelolaan strategi kehumasan, strategi komunikasi, pemberitaan, publikasi, hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri;



Penyiapan koordinasi administrasi perjanjian internasional dalam kerangka kerja sama bilateral, regional, multilateral dengan mitra internasional;

Penyiapan bahan pembinaan kehumasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan strategi komunikasi, pemberitaan, hubungan antar lembaga, informasi publik, informasi kebijakan pengelolaan kehutanan dan kebijakan lainnya, pengelolaan pengaduan dan sengketa informasi publik, serta hubungan dan kerja sama luar negeri serta perjanjian internasional;



Koordinasi dan fasilitasi administrasi perizinan kerja sama luar negeri;

Koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan administrasi atase kehutanan;



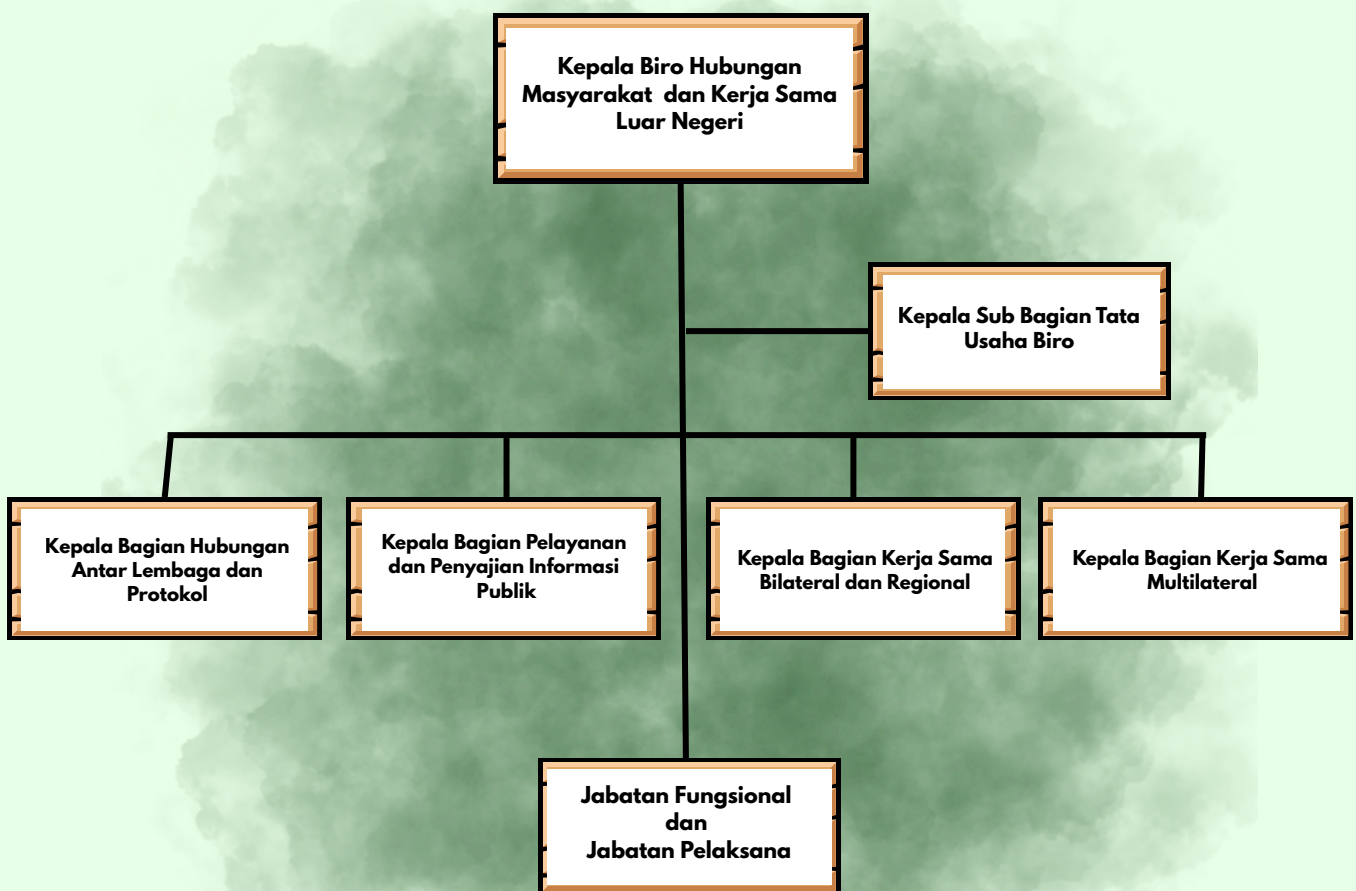
Pelaksanaan layanan keprotokolan Menteri dan wakil menteri serta manajemen keprotokolan Kementerian; dan

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.



Fungsi

1.2. STRUKTUR ORGANISASI



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan memuat struktur organisasi dari Biro HKLN

Biro HKLN terdiri atas:

a. Bagian Kerja Sama Luar Negeri Multilateral;

Tugas: melaksanakan penyiapan koordinasi administrasi perjanjian internasional dalam kerangka kerja sama multilateral dengan mitra internasional, serta koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis hubungan dan kerja sama luar negeri dalam kerangka kerja sama multilateral.

b. Bagian Kerja Sama Luar Negeri Bilateral dan Regional;

Tugas: Melaksanakan penyiapan koordinasi administrasi perjanjian internasional dalam kerangka kerja sama bilateral dan regional dengan mitra internasional, serta koordinasi dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis hubungan dan kerja sama luar negeri dalam kerangka kerja sama bilateral dan regional.

c. Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik

Tugas: Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi publik, peliputan, pemberitaan dan publikasi, penyusunan strategi komunikasi, penyusunan materi komunikasi publik, dan penyajian informasi publik.

d. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Keprotokolan

Tugas: Melaksanakan penyiapan koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan tugas hubungan antar pemangku kepentingan, layanan keprotokolan, penyebarluasan informasi dan edukasi publik, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

e. Subbagian Tata Usaha;

Tugas: Melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro

f. Kelompok Jabatan Fungsional



1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

JUMLAH ASN 99 PEGAWAI



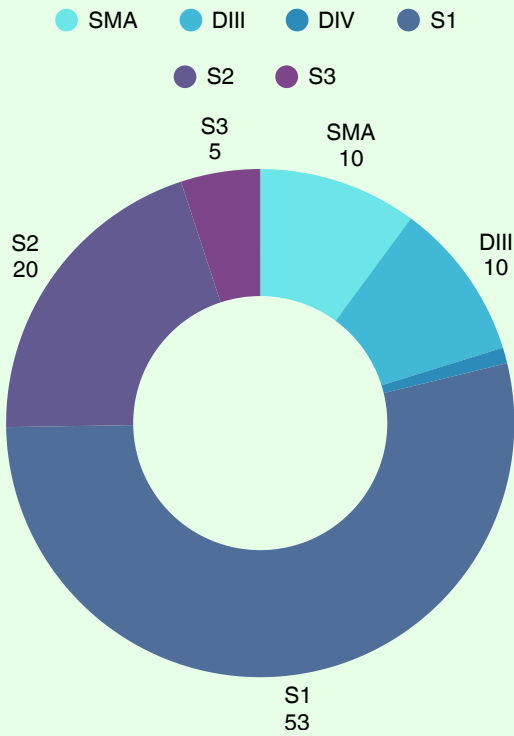
◆	Kepala Biro HKLN	1
◆	Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik	22
◆	Hubungan Antar Lembaga dan Keprotokolan	15
◆	Kerja Sama Bilateral dan Regional	20
◆	Kerja Sama Multilateral	16
◆	Tata Usaha	25



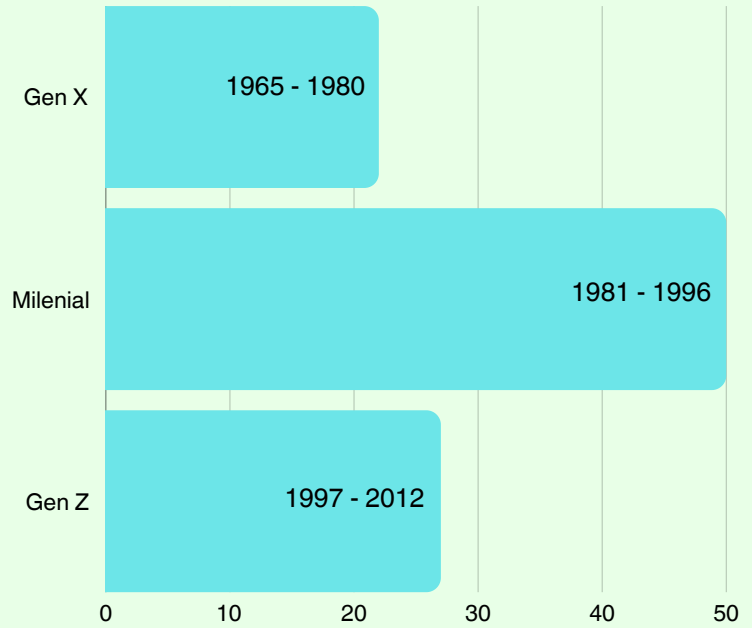
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro HKLN didukung oleh sumber daya yang terdiri dari 52 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 24 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 22 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 1 orang Pegawai Non-Pegawai Negeri (PPNPN), dengan sebaran 55% pegawai adalah berjenis kelamin pria dan 45% berjenis kelamin wanita.

Dari total 99 pegawai Biro HKLN tersebut, 2 orang pegawai diperbantukan di DPK/DPB dan 1 orang pegawai diperbantukan di Kementerian Luar Negeri. Sehingga total pegawai aktif di Biro Kerja Sama Luar Negeri berjumlah 96 orang.

Grafik Persebaran Pendidikan Pegawai Biro HKLN



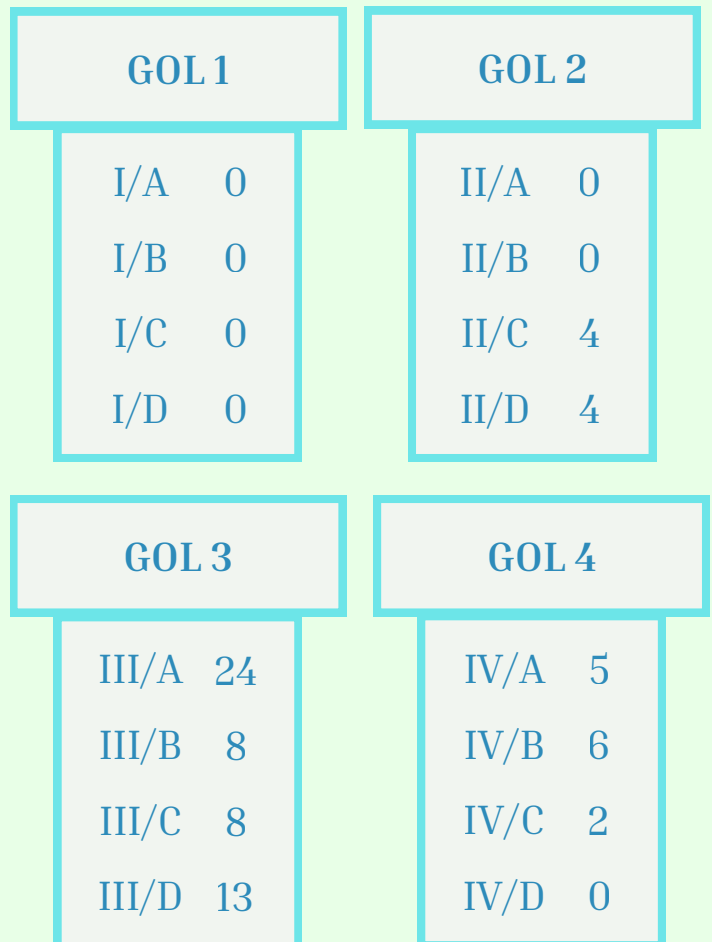
Grafik Usia Pegawai Biro HKLN



Grafik Status Kepegawaian Biro HKLN



Grafik Golongan Pegawai Biro HKLN

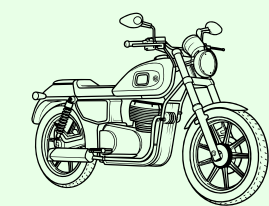


1.4. SARANA PRASARANA

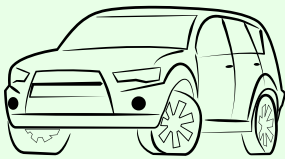
Dalam menjalankan kegiatannya pada tahun 2025, Biro HKLN didukung oleh sarana dan prasarana aset yang tercatat sebesar Rp8.389.495.778,- terdiri dari 435 aset berwujud dan 2 aset tak berwujud.

Aset berwujud terdiri dari kendaraan bermotor baik roda 4 dan roda 2 sebanyak 25 unit. Aset bergerak Biro HKLN tersebut terdiri dari 8 unit kendaraan roda 2, dan 18 unit kendaraan roda 4. Dengan mempertimbangkan faktor usia dan kelayakan pemakaian, aset bergerak direncanakan untuk dilakukan penghapusan pada waktu mendatang.

Selain itu, ada pula peralatan mesin dan kantor lainnya sebanyak 418 unit. Dari aset tersebut terdapat 2 aset tak berwujud berupa sistem database kerja sama luar negeri dan input kerja sama pada web Kemenhut.



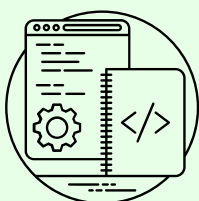
8



18

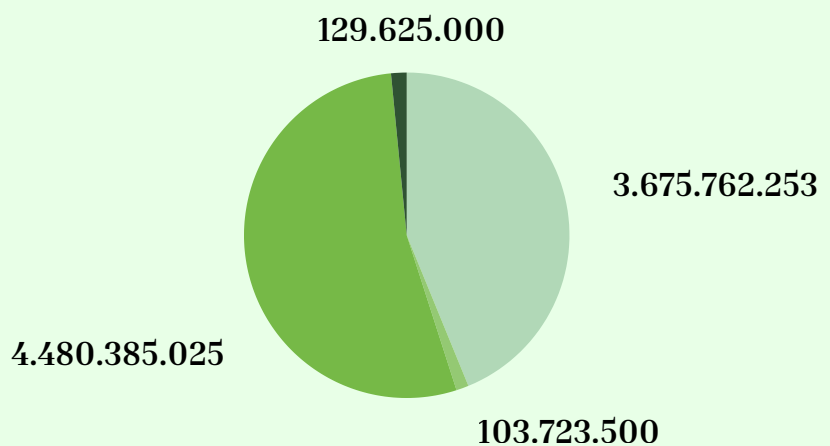


418



2

Jumlah Nominal Aset Tetap



- Aset Tak Berwujud
- Mesin dan Peralatan
- Kendaraan Bermotor Roda Dua
- Kendaraan Bermotor Roda Empat

1.5. ISU STRATEGIS 2025

Berbagai permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, telah menjadi isu global yang *challenging* dan memerlukan penanganan baik secara bersama-sama maupun sendiri (level nasional). Persoalan dan tantangan pengelolaan kehutanan di Indonesia bagaikan dua sisi mata uang kepentingan, yaitu antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan/konservasi.

Posisi Indonesia baik secara geografis, kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta berbagai persoalan lingkungan hidup dan kehutanan di nasional, serta kaitannya di level regional dan global, telah mendorong kepentingan dan *interests* mitra internasional untuk masuk dan berinteraksi dengan Indonesia.

Selain itu, dengan berkembangnya informasi teknologi yang muncul dalam media sosial dapat membuat informasi menyebar secara masif dan cepat. Hal ini dapat menjadi peluang atau ancaman bagi Biro Humas KLN selaku pengampu penyebarluasan informasi serta hubungan antar lembaga.

Pada tahun 2025, kompleksitas ini diprediksi akan semakin meningkat dengan masifnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi konten. Ancaman utama terletak pada potensi disrupsi berupa hoaks atau deepfake yang dapat menggerus kepercayaan publik secara seketika.

Di sisi kerja sama luar negeri, tawaran dukungan melalui kerja sama luar negeri, tidak lepas dari agenda internal dan *interest* mitra internasional yang belum tentu sejalan dengan kepentingan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri, antara lain:

- (i) pelaksanaan kegiatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- (ii) terdapat pelanggaran terhadap hak, kewajiban, dan yurisdiksi;
- (iii) pencurian materi genetik dan SDA Indonesia;
- (iv) dispute atas Hak Kekayaan Intelektual hasil proyek kerja sama luar negeri; dan masih banyak isu lainnya.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri terutama terkait dengan penerapan 5 (lima) prinsip aman dari aspek politis, yuridis, teknis, keamanan, dan keuangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri. Tantangan lainnya yaitu terkait penerapan prinsip *mutual trust*, *mutual respect*, *mutual benefit*, transparan, dan akuntabel dalam tataran pelaksanaan kerja sama luar negeri. Untuk itu, para pengelola kerja sama luar negeri di tingkat teknis dan di wilayah tapak, dituntut untuk memiliki peran sebagai benteng Kemenhut dalam mengawal pelaksanaan kegiatan kerja sama agar berjalan secara efektif dan efisien, serta mendukung kepentingan nasional.



PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA 2025



Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kerja Sama Luar Negeri disatukan menjadi satu entitas satker Eselon II Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri atau Biro HKLN. Penyatuan dua biro ini memunculkan ekspektasi kinerja yang baru sehingga perlu ada penyesuaian dalam perencanaan kinerja satker baik secara tahunan maupun selama lima tahun. Sehingga, tahun 2025 menjadi awal perumusan perencanaan kinerja baru bagi Biro HKLN. Rencana Kerja Tahun 2025 ini didasarkan dari Perjanjian Kinerja 2025 lingkup Biro HKLN.

Filosofi Perjanjian Kinerja 2025 mengikuti teori *Balanced Scorecard* di mana terdapat 3 aspek dalam kinerja yang terdiri atas perspektif pelanggan dan *stakeholder*, perspektif proses internal, serta pembelajaran dan perkembangan yang berkesinambungan satu sama lain.

Tabel Stakeholder dan Customer Perspective

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target
1.	Meningkatnya layanan hubungan masyarakat dan informasi yang efektif	1.1. Tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan koordinasi kerja sama luar negeri	3,5 Poin
		1.2. Persentase pemberitaan positif di media massa	55 Persen
2.	Meningkatnya Layanan Kerja Sama Luar Negeri yang efektif dan efisien	2.1. Kesepakatan Kerjasama luar negeri bidang kehutanan	80 Poin

Tabel Internal Process Perspective

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target
3.	Pengelolaan hubungan antar lembaga dan keprotokolan yang sinergis	3.1. Jumlah kegiatan hubungan antar lembaga dan layanan keprotokolan	100 Kegiatan
4	Peningkatan layanan penyajian informasi publik	4.1. Pemberitaan positif di media massa	4000 Berita
5.	Pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri yang strategis	5.1. Jumlah dokumen hasil kegiatan hubungan dan kerja sama luar negeri	5 Dokumen

Tabel Learning and Growth

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target
6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Biro Humas dan KLN yang Efektif	6.1. Indeks profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN	81-90 Poin
7.	Pengelolaan akuntabilitas kinerja Biro humas dan KLN yang efektif, efisien, dan akuntabel	7.1. Nilai SAKIP Biro Humas dan KLN	80 Poin
		7.2. Nilai SPIP Biro Humas dan KLN	3,5 Poin
		7.3. Persentase Penyerapan Anggaran Biro Humas dan KLN	99 Persen

2.2. POHON KINERJA



IKU

Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif dan Melayani

Sasaran Program
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan



IKP

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran Kegiatan
Hasil kerja aparatur yang berkualitas dan memberikan kontribusi nyata bagi kinerja organisasi di semua lini



IKK

Meningkatnya layanan hubungan masyarakat dan informasi yang efektif

Meningkatnya layanan kerjasama luar negeri yang efektif dan efisien

Tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan koordinasi kerja sama luar negeri

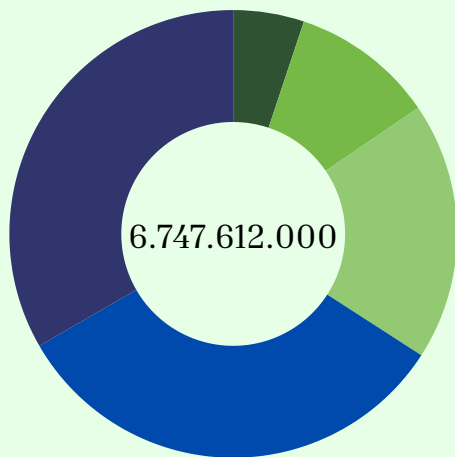
Persentase pemberitaan positif di media massa

Kesepakatan luar negeri kehutanan

Kerjasama bidang kehutanan

2.3. ALOKASI ANGGARAN

Di awal tahun 2025, Biro HKLN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp8.632.176.000. Selama pelaksanaan T.A. 2025 terjadi 2 (dua) kali revisi pagu anggaran sehingga alokasi anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp6.747.612.000. Hal ini disebabkan karena optimalisasi belanja pegawai untuk pemenuhan belanja pegawai dan optimalisasi terkait arahan kebijakan presiden Kabinet Merah Putih untuk menghemat Belanja Perjalanan Dinas.



- Layanan Jejaring Informasi
- Layanan Informasi Publik
- Layanan Hubungan Antar Lembaga
- Fasilitas Kerja Sama Internasional
- Layanan Perkantoran



Layanan Perkantoran
2.249.290.000





CAPAIAN KINERJA



3.1. CAPAIAN KINERJA

Tahun 2025 merupakan periode strategis bagi Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) Kementerian Kehutanan dalam memperkuat peran komunikasi publik dan diplomasi kehutanan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pengelolaan hutan berkelanjutan, Biro Humas dan KLN berfungsi sebagai garda terdepan dalam membangun narasi kebijakan kehutanan yang kredibel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Sepanjang tahun 2025, bagian Humas berfokus pada penguatan strategi komunikasi hubungan antar lembaga dan publik yang adaptif, terpadu, dan berbasis data. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas diseminasi informasi kebijakan kehutanan, pengelolaan hubungan media yang lebih proaktif, serta pemanfaatan kanal komunikasi digital secara optimal.



Komunikasi publik diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap agenda kehutanan nasional, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap peran Kementerian Kehutanan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Di bidang kerja sama luar negeri bilateral maupun multilateral, bagian HKLN berperan aktif dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan hubungan bilateral dan multilateral dengan mitra internasional. Tahun 2025 ditandai dengan intensifikasi dialog strategis dengan negara sahabat dan organisasi internasional, termasuk penguatan kerja sama teknis, pendanaan, serta pertukaran pengetahuan di bidang kehutanan.

Merujuk kepada Renstra 2025-2029, tugas utama Biro HKLN adalah “Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan” dengan sasaran “Meningkatnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang Efektif” serta “Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri” dengan sasaran “Meningkatnya Layanan Kerja Sama Luar Negeri yang Efektif dan Efisien”. Kegiatan oleh Biro HKLN tersebut menghasilkan output “Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi” dan “Layanan Kerja Sama Internasional”. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2025 lingkup Biro HKLN, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi bagian *Stakeholder dan Customer Perspective*. IKK tersebut adalah sebagai berikut

1. Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat, dengan target 3,5 poin;
2. Persentase Pemberitaan Positif di Media Massa dengan target berita positif 55%;
3. Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri Bidang Kehutanan, dengan target kesepakatan baru tahun 2025 sebanyak 5 kesepakatan.

Capaian kinerja Biro KLN pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

IKK 1.1 yakni Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri menargetkan sebanyak 3,5 poin dan saat ini nilai mencapai 3,51 poin.

IKK 1.2. Persentase Pemberitaan Positif di Media Massa menargetkan berita positif sebesar 55% dan realisasi IKK 1.2. tahun 2025 adalah 55,04%. Pemberitaan positif tersebut bersumber dari media daring yang mengangkat berbagai program dan kebijakan Kementerian Kehutanan dan Menteri Raja Juli Antoni. Pada bulan Desember, meningkatnya pemberitaan mengenai bencana alam yang menyoroti pengelolaan kawasan hutan dan peran Kemenhut dalam mitigasi dan rehabilitasi lingkungan menyebabkan adanya pemberitaan yang bersifat kritis, meskipun tetap diimbangi dengan informasi positif mengenai langkah respons, koordinasi, dan komitmen kementerian dalam menjaga kelestarian hutan dan fungsi lingkungan.

IKK 2.1. Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri Bidang Kehutanan menargetkan kesepakatan baru tahun 2025 sebanyak 5 kesepakatan dan realisasi menunjukkan terdapat 20 kesepakatan kerja sama luar negeri yang telah ditandatangani tahun 2025.

1.1.



Tingkat Kepuasan
Layanan Hubungan
Masyarakat dan
Koordinasi Kerja
Sama Luar Negeri

3,504 Poin

1.2.



Persentase
Pemberitaan Positif
di Media Massa

55,04%

2.1.

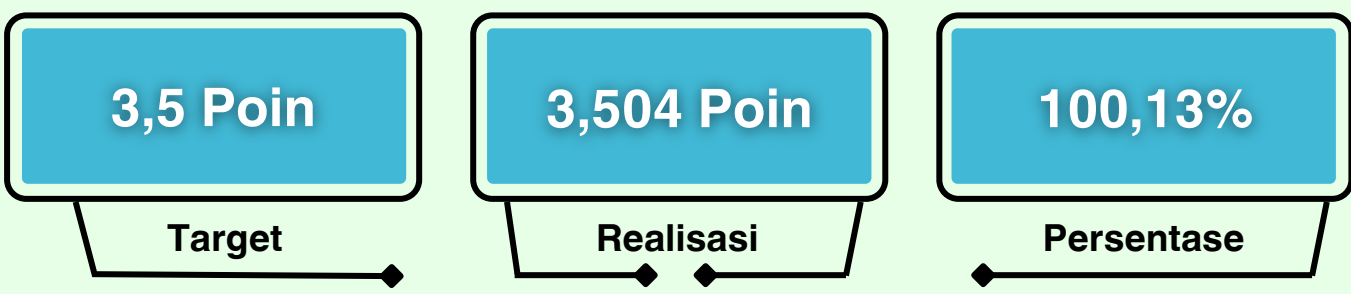


Kesepakatan
Kerjasama Luar
Negeri Bidang
Kehutanan

20
Kesepakatan



3.1.1. TINGKAT KEPUASAN LAYANAN



Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 sebagai bentuk evaluasi kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan.

Pelaksanaan survei ini juga menjadi bagian dari upaya pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu nilai kepuasan layanan masyarakat sebesar 3,5. Berdasarkan hasil survei sampai saat ini, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,504. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri secara umum telah melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori baik mendekati sangat baik.

Tingkat kepuasan pelayanan dihitung berdasarkan survei penilaian terhadap 7 pelayanan, diantaranya:

- (i) Layanan Permohonan Informasi Publik (PPID);
- (ii) Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N LAPOR;
- (iii) Layanan Hubungan Antar Lembaga;
- (iv) Layanan Administrasi Penugasan Tenaga Asing;
- (v) Layanan Administrasi Pembebasan Pajak;
- (vi) Layanan Fasilitas Penyusunan Perjanjian Internasional; dan
- (vii) Layanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Adapun unsur-unsur yang menjadi bagian dari penilaian tingkat kepuasan pelayanan fasilitas diantaranya:

- Kemudahan persyaratan
- Kesesuaian prosedur
- Waktu Pelayanan
- Biaya/Tarif
- Produk Spesifikasi Pelayanan
- Kompetensi Pelaksana atau Kecepatan Respon Aplikasi/Website/Portal
- Perilaku Pelaksana/Kemudahan Fitur
- Sarana dan Prasarana
- Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Dibandingkan dengan target Renstra, angka ini melebihi target tahun 2025 yakni 3,504. Namun angka ini masih kurang dari target 2026 yakni 3,55. Target ini pun secara konstan meningkat sebesar 0,05 setiap tahunnya sampai ke tahun 2029 sebesar 3,7. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun target telah dipenuhi, masih banyak aspek pelayanan yang perlu dibenahi di Biro HKLN.

Secara rinci, capaian nilai per pelayanan menunjukkan bahwa Pelayanan Fasilitas Penugasan Tenaga Asing memperoleh nilai tertinggi sebesar 3,63, diikuti oleh Pelayanan Permohonan Informasi Publik (PPID) sebesar 3,53, Pelayanan Hubungan Antar Lembaga dan Protokol sebesar 3,511, Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar 3,42, serta Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! sebesar 3,40. Sementara itu, Pelayanan Administrasi Pembebasan Pajak memperoleh nilai terkecil yaitu 2,970 yang dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah responden dan karakteristik layanan yang bersifat spesifik.



Tabel Perbandingan Realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan dengan target Renstra 2025-2029

Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar layanan telah berjalan dengan baik, khususnya pada aspek kompetensi dan perilaku pelaksana, kesesuaian prosedur, serta kualitas produk layanan. Adapun aspek yang masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan meliputi waktu penyelesaian layanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan, guna semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

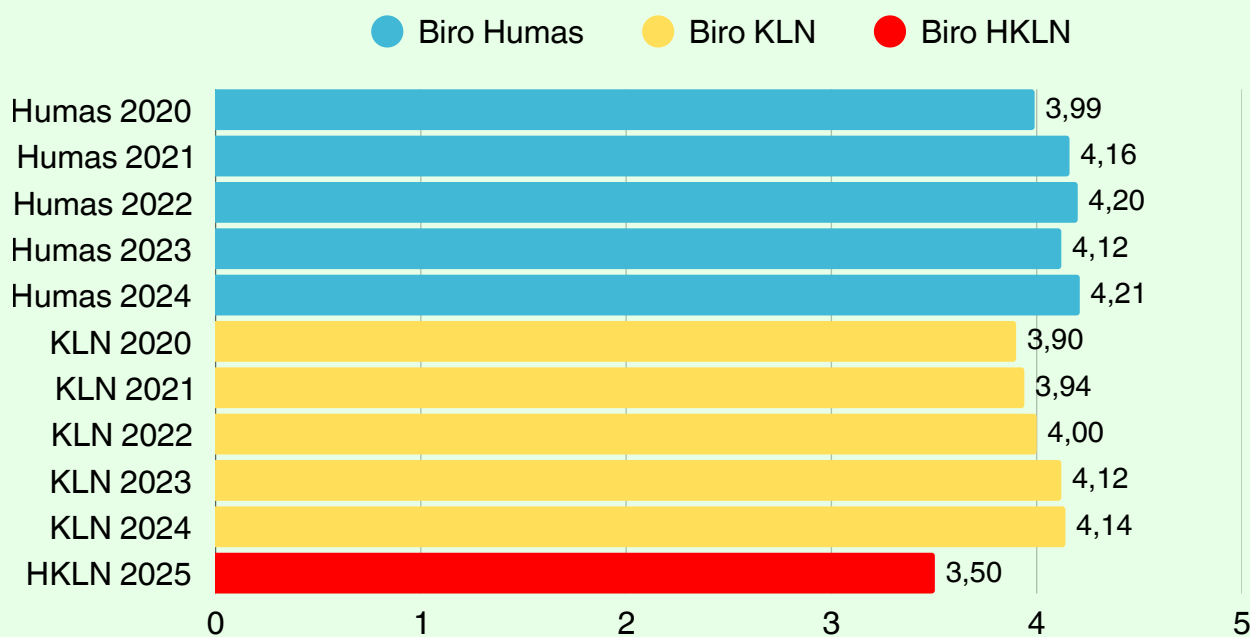
Survey tingkat kepuasan layanan telah diambil secara rutin baik oleh Biro Humas maupun Biro KLN sebelum kedua biro tersebut digabung menjadi Biro Humas dan KLN. Hasil survey untuk masing-masing biro cenderung meningkat setiap tahunnya dari mulai 2020-2024.

Biro Humas mencatat tingkat kepuasan pelayanan tahun 2020 sebesar 3,99 poin. Angka ini secara konsisten meningkat pada tahun 2021 menjadi 4,16 poin dan tahun 2022 menjadi 4,20 poin. Penilaian pada tahun 2023 menurun menjadi 4,12 lalu meningkat lagi pada tahun 4,21.

Tren yang sama terlihat di Biro KLN dengan tahun 2020 mencatat angka sebesar 3,90 poin dan meningkat setiap tahunnya dengan pencapaian tahun 2021 sebesar 3,94, tahun 2022 sebesar 4,00, tahun 2023 sebesar 4,12, dan tahun 2024 sebesar 4,14.

Pada tahun 2025, menyatunya Biro Humas dan KLN memunculkan urgensi perumusan kembali unsur-unsur survei yang dapat mencerminkan tingkat pelayanan fasilitasi humas serta KLN. Tahun 2025 mencatat tingkat kepuasan pelayanan hubungan masyarakat dan koordinasi kerja sama luar negeri sebesar 3,504 poin.

Perbedaan tingkat kepuasan layanan tersebut dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh perubahan skala penilaian dari 5 menjadi 4 dan unsur-unsur yang dinilai dalam survei tingkat kepuasan layanan tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu, angka ini berada di atas target yakni 3,50 yang menunjukkan bahwa sebagian besar layanan telah berjalan dengan baik dan kepercayaan terhadap penggunaan layanan yang disediakan Biro HKLN tetap terjaga.



Tabel Perbandingan Realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Biro Humas, Biro KLN, dan Biro HKLN 2020-2025

Rata-rata Nilai per Unsur Pelayanan	Kemudahan persyaratan	Kesesuaian Prosedur	Waktu Pelayanan	Biaya/ Tarif	Produk Spesifikasi Pelayanan	Kompetensi Pelaksana/ Pecepatan Respon Aplikasi/ Website/ Portal	Perilaku Pelaksana/ Kemudahan Fitur	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Nilai Akhir per pelayanan
PELAYANAN PENUGASAN TENAGA ASING	3,50	4,00	4,00	3,50	3,50	4,00	3,50	3,50	3,50	3,63
PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBEBASAN PAJAK	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,97
PELAYANAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	3,52	3,43	3,43	3,67	3,52	3,48	3,33	3,33	3,33	3,42
PELAYANAN FASILITASI PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	3,50	3,60	3,35	3,70	3,45	3,70	3,65	3,40	3,45	3,50
PELAYANAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	3,49	3,49	3,42	3,53	3,52	3,66	3,73	3,51	3,57	3,51
PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SP4N LAPOR	3,38	3,50	3,50	3,38	3,50	3,50	3,36	3,38	3,38	3,40
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (PPID)	3,62	3,57	3,52	3,53	3,55	3,57	3,63	3,55	3,52	3,53
TOTAL NILAI PELAYANAN	3,54	3,53	3,46	3,55	3,52	3,61	3,64	3,50	3,51	3,50

Tabel Realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri

LAYANAN PEMBERITAAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025

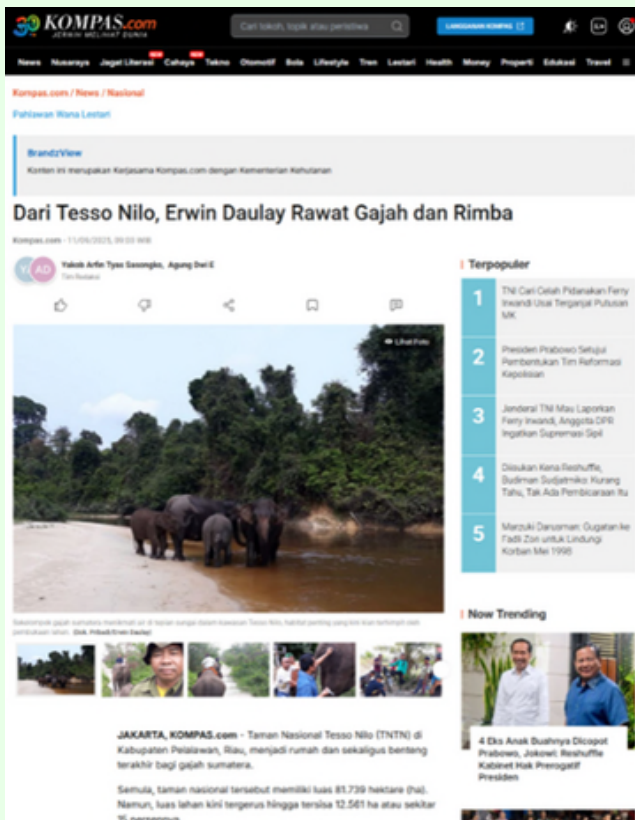
Kerjasama publikasi dan pemberitaan pembangunan Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan capaian pembangunan sektor kehutanan.

Kerjasama ini melibatkan media daring nasional berpengaruh, yaitu Kompas.com dan Detik.com, serta media cetak regional strategis Harian Solopos, yang dipilih berdasarkan jangkauan audiens, kredibilitas redaksional, dan kesesuaian dengan segmentasi publik sasaran. Seluruh pelaksanaan kerjasama mengacu pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.



A. Pemberitaan di Media *Online*

Pada media *online*, publikasi difokuskan pada pemberitaan tematik pembangunan kehutanan yang disajikan dalam format berita dan advertorial berbasis isu strategis nasional, dengan penekanan pada substansi kebijakan, capaian program, serta narasi pembangunan berkelanjutan. Penempatan konten pada Kompas.com dan Detik.com dinilai efektif dalam memperluas jangkauan informasi kepada publik nasional, khususnya kelompok pembaca digital aktif, serta memperkuat *framing* positif terhadap peran Kementerian Kehutanan dalam agenda pembangunan nasional. Namun demikian, secara kritis perlu dicatat bahwa optimalisasi analisis dampak (*media value* dan *engagement*) masih perlu diperkuat sebagai dasar pengukuran efektivitas biaya dan kualitas eksposur pemberitaan



1. Publikasi di Media *Online*

Detik.com

Kerjasama media dengan detik.com dilaksanakan dari tanggal 23 April – 31 Juli 2025, dengan *output* sebanyak 16 (enam belas) artikel, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Publikasi di Media *Online*

Kompas.com

Kerjasama dilaksanakan dari tanggal 20 Agustus – 30 September 2025, dengan *output* sebanyak 5 (lima) artikel khusus (*brandstory*) yang ditulis oleh redaksi dalam dan ditayangkan di Kompas.com, dengan dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



B. Pemberitaan di Media Cetak

Kerja sama media cetak melalui Harian Solopos dilaksanakan dalam bentuk publikasi satu halaman berwarna (*full colour*) pada segmen *backcover* dengan tema “Hutan sebagai Penopang Kemerdekaan”, yang terbit tanggal 16 Agustus 2025 menjelang momentum nasional Hari Kemerdekaan Ke-80 Republik Indonesia sebagai upaya penguatan kinerja pemerintah. Publikasi ini memiliki nilai strategis dalam menjangkau pemangku kepentingan daerah dan pembaca loyal media cetak, sekaligus memperkuat pesan simbolik pembangunan kehutanan dalam konteks kebangsaan. Anggaran untuk publikasi pemberitaan di Solopos sebesar Rp.25.000.000,-

No.	Media	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1.	Detik.com	100.000.000	99.875.000	99,87%
2.	Kompas.com	100.000.000	99.650.000	99,65%
3.	Koran Solopos	25.000.000	25.000.000	100%
Total		225.000.000	224.525.000	99,78%



Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

Hutan Penopang Kemerdekaan

Selama delapan dekade Indonesia merdeka, hutan telah menjadi salah satu penopang utama kehidupan bangsa. Di balik hijaunya pepohonan, mengalir manfaat yang tak ternilai, mulai dari udara bersih, air yang melimpah, hingga pangan yang sehat. Kementerian Kehutanan (Kemenhut), melalui beragam program dan kebijakan, memastikan hutan Indonesia dikelola dengan bijak, lestari, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat. Inilah delapan kontribusi hutan untuk menopang kemerdekaan yang tahun ini genap 80 tahun kita nikmati.

1 Pencegahan Deforestasi Solusi Perubahan Iklim

Kemenhut menjaga 95,5 juta hektare hutan atau 51,7% daratan Indonesia pada 2024, dengan deforestasi terendah dalam satu dekade. Langkah ini sejalan target FOLU Net Sink 2030, menempatkan kehutanan sebagai garda depan pengendalian iklim.

2 Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

Kemenhut menetapkan 160 Hutan Adat seluas 333.687 hektare bagi 83.043 KK di 41 kabupaten dan 19 provinsi sejak 2016 hingga Juli 2025, memberi ruang masyarakat adat mengelola hutan sesuai tradisi. Melalui agroforestry, hutan dijaga sekaligus dimanfaatkan untuk pangan, termasuk penanaman padi lahan kering di 132.379 hektare Perhutanan Sosial dan CPCL seluas 10.220 hektare, serta budidaya jagung dan tebu untuk swasembada pangan.

3 Penghasil Energi Terbarukan

Hutan menjadi sumber bahan baku energi hijau, seperti dari pohon aren yang menghasilkan nira untuk bioetanol. Ini menjadi alternatif energi ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penanaman 319.345 hektare pohon aren sudah dimulai Mei 2025.

4 Hutan menjaga Ketersediaan Air

Hutan sehat di hulu DAS berfungsi sebagai bendungan hijau alami yang menyerap dan menyimpan air hujan, lalu melepaskannya perlahan ke mata air, sungai, dan danau. Mekanisme ini mencegah banjir sekaligus menjaga pasokan air bersih bagi rumah tangga, pertanian, dan industri sepanjang tahun.

5 Rehabilitasi dan Pemulihan hutan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan guna menjaga sistem pernyangan kehidupan. Upaya ini meliputi penanaman di daratan, rehabilitasi DAS dan mangrove, penyediaan bibit melalui KBR, KBD, dan persemaian permanen. Dalam lima tahun terakhir, RHL vegetatif mencapai 980.271 hektare, sementara RHL sipit teknis membangun 9.712 unit BKTA untuk mencegah bencana, memperbaiki lahan kritis, meningkatkan kualitas air, dan memulihkan DAS secara berkelanjutan.

6 Konservasi dan Ecotourism

Hutan Indonesia adalah rumah bagi spesies langka seperti orangutan, harimau sumatra, dan bunga rafflesia. Melalui perlindungan habitat dan pengawasan ketat, kementerian memastikan satwa dan tumbuhan endemik ini tetap hidup untuk generasi mendatang. Hutan Indonesia dikelola sebagai destinasi wisata alam dengan konsep ecotourism. Kemenhut mengelola Wisata alam di 57 Taman Nasional (TN) dan 126 Taman Wisata Alam (TWA). Penerapan ecotourism dipromosikan dengan perhelatan sistem digitalisasi yang telah mencapai 87%.

8 Penegakan Hukum Kehutanan

Upaya penegakan hukum kehutanan yang dilakukan oleh Kemenhut dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang sudah dilakukan oleh Kemenhut antara lain pengawasan terhadap 15 badan usaha. Untuk mencegah kebakaran hutan, Kemenhut melakukan apel siaga, kampanye, dan modifikasi cuaca. Dalam hal upaya represif, Kemenhut menindak beberapa pelaku kejahatan, termasuk 30 kasus yang masuk tahap P1.

7 Hasil Hutan sebagai Penopang Ekonomi Bangsa

7. Hingga 8 Agustus 2025, ekspor kayu olahan Indonesia mencapai US\$1,42 miliar (10,15 juta ton), didominasi kertas, pulp, dan panel kayu, dengan pasar utama Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Pertumbuhan stabil lima tahun terakhir menunjukkan keberhasilan strategi SVLK, mengokohkan posisi Indonesia sebagai pemasok kayu legal ramah lingkungan sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi, keberlanjutan hutan, dan reputasi internasional.

Hutan Lestari, Indonesia Maju

Presiden mengamanahkan kita untuk menjaga hutan. Dalam konteks lebih besar, menjaga ini tentu memastikan bahwa hutan kita tetap menjadi paru-paru dunia bagi Indonesia dan dunia, serta semaksimal mungkin sumber daya yang ada di hutan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat."

Menteri Kehutanan,
Raja Juli Antoni



LAYANAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pada Tahun 2025, Kementerian Kehutanan menghadapi tantangan pembangunan kehutanan yang semakin kompleks, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pengelolaan hutan. Kondisi ini menuntut penguatan peran Hubungan Antar Lembaga dan Protokol (HALP) dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan strategis.

Bagian HALP berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan, program, dan capaian kinerja Kemenhut melalui penguatan kerja sama dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, serta masyarakat luas. Dukungan dari para mitra strategis tersebut menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong penerimaan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan kehutanan.

Selain itu, Bagian HALP menjalankan fungsi keprotokolan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pimpinan kementerian, baik dalam forum resmi, pertemuan lintas sektor, serta kegiatan kenegaraan lainnya. Penyelenggaraan keprotokolan menjadi bagian penting dalam menjaga citra kelembagaan serta memperkuat hubungan kerja sama dengan para mitra strategis.

Kegiatan keprotokolan difokuskan pada pelayanan terhadap agenda pimpinan kementerian, baik kegiatan internal maupun eksternal, termasuk rapat koordinasi, pertemuan lintas kementerian/lembaga, kunjungan kerja, serta kegiatan kenegaraan dan seremonial lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, persiapan teknis, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi pasca kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap agenda berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan guna menjaga citra kelembagaan Kemenhut.

Pertemuan Perjanjian Kerja Sama Antara Itjen Kemenhut dengan Ombudsman, 5 Agustus 2025



Hubungan dengan Lembaga Pemerintah

Hubungan dengan lembaga pemerintah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain koordinasi, pertemuan teknis (audiensi dan konsultasi), fasilitasi kunjungan kerja, serta partisipasi dalam forum lintas kementerian/lembaga. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan kebijakan, program prioritas, serta capaian kinerja Kementerian Kehutanan secara terintegrasi. Koordinasi yang dibangun mencakup Lembaga Legislatif, Kementerian/lembaga, serta Pemerintah Daerah, dengan fokus pada penyelarasan kebijakan kehutanan dengan agenda pembangunan nasional dan daerah. Melalui komunikasi yang intensif dan terstruktur, diharapkan pelaksanaan program kehutanan dapat berjalan lebih efektif dan saling mendukung.

Berdasarkan hasil evaluasi data kegiatan hubungan antar lembaga pada tahun 2025, terdapat sebanyak 146 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol.

Kegiatan Keprotokolan

Sepanjang Tahun 2025, kegiatan keprotokolan menunjukkan intensitas yang tinggi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepemimpinan, koordinasi kebijakan, serta pengawasan program kehutanan. Secara kumulatif, kegiatan keprotokolan yang telah dilaksanakan yaitu sebanyak 185 kegiatan terdiri dari 53 kegiatan pimpinan yang dilaksanakan di daerah Jakarta dan 132 kunjungan kerja ke luar daerah.

Hubungan dengan Lembaga Non-Pemerintah

Pada Tahun 2025, Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol Kementerian Kehutanan melaksanakan kegiatan hubungan dengan lembaga non-pemerintah sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi, koordinasi, dan partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan kehutanan. Kegiatan ini menjadi sarana penyerapan aspirasi serta penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Stakeholder non-pemerintah dalam hal ini mencakup LSM, organisasi masyarakat, mahasiswa, akademisi, serta masyarakat luas lainnya.

Sepanjang Tahun 2025, jumlah kegiatan hubungan dengan non-pemerintah yang difasilitasi tercatat sebanyak 31 kegiatan, yang terdiri atas 13 kegiatan audiensi/konsultasi dan 18 kegiatan unjuk rasa. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memperhatikan prinsip keterbukaan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Bulan	DPRD/ Pemda	DPR/DPD				K/L	Total
	Audiensi	FGD	Kunker	Raker	RDP	Bakohumas	
Januari	1	1	3	2			7
Februari	4		4	3	1		18
Maret	2			1	1	1	6
April			3	1	1		11
Mei	4		5		3	2	21
Juni	2		4				8
Juli	1	1	4	4	1	4	17
Agustus	1		5			3	10
September	3		6	4	1	1	18
Oktober	2		2			4	9
November	1		4	2	1	1	12
Desember	1		5	1		2	9
TOTAL	22	2	48	18	9	18	146

Tabel Kegiatan Hubungan Antar Lembaga

Bulan	Masyarakat/LSM		Total
	Audiensi	Unras	
Januari	1	2	3
Februari		2	2
Maret		1	1
April	1	1	2
Mei	4	1	5
Juni	1	3	4
Juli	1	2	3
Agustus	1	2	3
September	1	1	2
Oktober	2	1	3
November	1	2	3
Desember			
TOTAL	13	18	31

Bulan	Kunjungan Kerja Menteri/Wamen		Total
	Luar Daerah	Jakarta	
Januari	13		13
Februari	8		8
Maret	8		8
April	7	1	8
Mei	9	3	12
Juni	12	3	15
Juli	12	6	18
Agustus	12	3	15
September	12	7	19
Oktober	14	13	27
November	13	7	20
Desember	12	10	22
TOTAL	132	53	185

Tabel Kegiatan Hubungan dengan Lembaga Non-Pemerintah

Tabel Kegiatan Keprotokolan

FASILITASI PELAKSANAAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Fasilitasi kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Kehutanan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama yang sah dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di bidang kerja sama luar negeri bilateral, regional, maupun multilateral, bagian KLN berperan aktif dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan hubungan bilateral, regional, dan multilateral dengan mitra internasional.

Tahun 2025 ditandai dengan intensifikasi dialog strategis dengan negara sahabat dan organisasi internasional, termasuk penguatan kerja sama teknis, pendanaan, serta pertukaran pengetahuan di bidang kehutanan. Ada pula fasilitasi yang diberikan oleh HKLN termasuk fasilitasi penugasan tenaga asing, fasilitasi pembebasan pajak dan kepabeanan, pengusulan training, fasilitasi pengajuan peralatan proyek, permosesan izin pertemuan regional, dan pemrosesan izin perjalanan dinas luar negeri.

*Pertemuan Delegasi RI Komisi IV DPR RI dengan MAFF Jepang,
5 Agustus 2025*



Fasilitasi Penugasan Tenaga Asing

Fasilitasi penugasan tenaga asing diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama teknis dengan mitra internasional. Pada 2025, rekomendasi penugasan telah diberikan kepada 2 (dua) tenaga asing dari *Korea Forest Service* (KFS), 4 (empat) tenaga asing dalam kerja sama dengan Pemerintah Jepang melalui JICA, dan 4 (empat) tenaga asing dari Pemerintah Jerman, serta 1 (satu) orang tenaga asing dari ormas asing *Frankfurt Zoological Society* (FZS).

Fasilitasi ini mencakup dukungan administratif dan keimigrasian guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Usulan Training

Sepanjang 2025, Biro HKLN selaku focal point pemrosesan izin perjalanan dinas luar negeri termasuk di dalamnya pengusulan delegasi training atau pelatihan yang merupakan bagian dari kerja sama dengan negara-negara mitra. Tercatat sebanyak 29 orang delegasi yang melaksanakan pelatihan tersebar ke 13 kegiatan pelatihan.

Fasilitasi Pembebasan Pajak dan Kepabeanan

Dalam rangka mendukung kelancaran implementasi proyek kerja sama luar negeri, Kementerian Kehutanan melalui Biro HKLN telah memberikan rekomendasi pembebasan pajak impor kepada mitra GIZ sebanyak 4 (empat) kali pengurusan, dengan total nilai sebesar Rp218.036.940, untuk mendukung pelaksanaan Proyek FORCLIME.

Pemberian fasilitasi pembebasan pajak dan kepabeanan tersebut berkontribusi langsung terhadap efektivitas pelaksanaan proyek, optimalisasi pemanfaatan sumber daya kerja sama, serta penguatan sinergi antara Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan dalam mendukung tata kelola kehutanan dan keberlanjutan sumber daya hutan nasional.

Fasilitasi Pengajuan Peralatan Proyek

Sepanjang 2025, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri telah memfasilitasi 1 (satu) pemrosesan izin berupa *Application Form for Equipment* (Form A4) peralatan proyek kepada Kementerian Sekretariat Negara. Peralatan proyek tersebut sedianya akan dimanfaatkan dalam mendukung proyek kerja sama luar negeri antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang/JICA yakni Program *Community Movement Program on Forest and Land Fire Prevention*.

Mekanisme Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Fasilitasi kerja sama luar negeri di lingkungan Kementerian Kehutanan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama yang sah dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) sebagaimana diatur oleh Kementerian Sekretariat Negara. PDLN merupakan instrumen negara untuk menjamin bahwa setiap aktivitas luar negeri yang melibatkan aparatur pemerintah dilaksanakan secara terkoordinasi, akuntabel, dan mendukung kepentingan nasional.

Dalam konteks kerja sama kehutanan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) berperan sebagai *focal point* dalam koordinasi substantif dan administratif, mulai dari penelaahan kesesuaian kegiatan dengan ruang lingkup kerja sama, sinkronisasi agenda dengan mitra luar negeri, hingga penyampaian rekomendasi PDLN kepada Kementerian Sekretariat Negara. Mekanisme ini memastikan bahwa pemberian fasilitas kerja sama teknik, termasuk kunjungan kerja, penugasan tenaga ahli, dan kegiatan *benchmarking*, dilaksanakan secara selektif, proporsional, serta tidak melampaui mandat kerja sama yang disepakati.





Pelaksanaan fasilitasi PDLN juga memperhatikan efisiensi anggaran, kejelasan output kegiatan, serta kontribusinya terhadap penguatan kebijakan dan tata kelola kehutanan nasional, khususnya dalam mendukung agenda pengelolaan hutan lestari, penguatan KPH, dan reformasi regulasi kehutanan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama luar negeri sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) melaksanakan fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) untuk kegiatan yang bersifat bilateral. Fasilitasi PDLN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Sekretariat Negara sebagai instrumen pengendalian, koordinasi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan luar negeri aparatur pemerintah.

Sepanjang periode pelaporan, Biro HKLN memfasilitasi PDLN bagi 164 delegasi/pejabat Kementerian Kehutanan yang terlibat dalam 46 kegiatan kerja sama kehutanan. Kegiatan tersebut mencakup pertemuan multilateral, bilateral, regional, konsultasi teknis, dialog kebijakan, serta kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan penguatan pengelolaan hutan lestari, kerja sama pembiayaan kehutanan, dan penguatan kerja sama internasional Kementerian Kehutanan.

Training Komunikasi Diplomatik dan Negosiasi Internasional

Biro HKLN Kehutanan bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Pelatihan Komunikasi Diplomatik dan Negosiasi Internasional bagi ASN yang terlibat dalam pengelolaan kerja sama luar negeri. Pelatihan dilaksanakan dalam dua angkatan pada 13-15 Oktober 2025 dan 29-31 Oktober 2025. Kegiatan dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari *Result Based Contribution* Norwegia Tahap 2 dan 3 (FOLU-NC 2&3).

Tujuan dari kegiatan Pelatihan Komunikasi Diplomatik dan Negosiasi Internasional adalah untuk meningkatkan kapasitas ASN Kehutanan dalam merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi proses kerja sama luar negeri; menguatkan kemampuan komunikasi diplomatik dan strategi serta taktik negosiasi dalam memfasilitasi kerja sama luar negeri; dan Meningkatkan kemampuan ASN Kehutanan dalam menghadapi dinamika global dan isu strategis bidang kehutanan.

Pelatihan ini dirancang sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan keterampilan teknis, dan diharapkan mampu melahirkan aktor diplomasi dan negosiator yang tangguh, profesional, dan mampu mewakili kepentingan Kementerian Kehutanan secara kredibel di berbagai forum kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral

Materi pelatihan yang disampaikan dalam kegiatan antara lain:

1. Materi Pengantar Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri;
2. Materi Strategi Komunikasi dalam Komunikasi Internasional;
3. Materi *Public Speaking and Personal Branding as Indonesia's Representative*;
4. Materi Komunikasi Lintas Budaya;
5. Materi Teknik-Teknik Negosiasi dan Negosiasi dalam Forum Internasional;
6. Diplomasi dan Negosiasi Regional: Sidang ASEAN dan Praktik Negosiasi.



Pelatihan ini difasilitasi langsung oleh pejabat tinggi dan praktisi ahli dari Kementerian Luar Negeri, serta diikuti oleh 40 peserta yang merupakan focal point kerja sama internasional dari berbagai unit kerja Kementerian Kehutanan. Secara umum, pelatihan berhasil meningkatkan kapasitas teknis dan kepercayaan diri peserta, yang terukur melalui hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* serta keaktifan dalam simulasi. Mengingat tingginya antusiasme dan efektivitas kegiatan, direkomendasikan agar di masa mendatang durasi pelatihan ditambah, cakupan materi diperluas, serta dikembangkan skema pelatihan lanjutan yang dapat direplikasi di unit-unit teknis lainnya.



Dalam kerangka pengembangan SDM berbasis *corporate university*, penguatan kompetensi diplomasi ini perlu dirancang sebagai program berkelanjutan yang dilaksanakan secara rutin tahunan, bukan sekadar kegiatan insidental. Sinergi dengan Pusdiklat Kehutanan menjadi sangat strategis untuk melembagakan kurikulum yang disusun secara berjenjang sesuai tingkat pengalaman peserta. Pendekatan ini bertujuan memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan mampu mencetak negosiator kehutanan yang profesional, adaptif, serta memiliki daya saing tinggi dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Selain penguatan internal, dukungan dan kolaborasi dengan mitra internasional juga menjadi faktor krusial untuk memperkaya perspektif diplomasi peserta. Melalui pertukaran pengetahuan dan program pelatihan bersama, SDM kehutanan Indonesia diharapkan mampu mengadopsi praktik terbaik global dan merespons dinamika isu strategis dengan lebih baik. Integrasi antara peningkatan kapasitas domestik dan dukungan internasional ini pada akhirnya akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam diplomasi kehutanan di tingkat regional maupun multilateral.



3.1.2. PEMBERITAAN POSITIF



Sentimen	Jumlah Pemberitaan	Persentase
Positif	45.773	55,04%
Netral	14.367	17,28%
Negatif	23.024	27,68%
Total	83.164	100%

Sepanjang tahun 2025, pemberitaan mengenai sektor kehutanan menunjukkan kecenderungan yang didominasi oleh sentimen positif. Berdasarkan hasil pemantauan pemberitaan hingga akhir tahun, tercatat total 83.164 eksposur pemberitaan, dengan 45.773 di antaranya bernada positif, atau lebih dari separuh total pemberitaan yang beredar di ruang publik.

Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan, program, dan respons Kementerian Kehutanan sepanjang 2025 relatif diterima dan diapresiasi oleh media serta masyarakat, terutama pada isu-isu strategis seperti penanganan pasca bencana, konservasi satwa liar, penguatan kawasan konservasi, serta kehadiran negara dalam pemulihan lingkungan dan akses masyarakat. Pemberitaan netral tercatat sebanyak 14.367 eksposur, umumnya bersifat informatif dan faktual, seperti laporan kegiatan lapangan, kunjungan kerja, serta perkembangan program kehutanan di daerah.

Sementara itu, pemberitaan bernada negatif berjumlah 23.024 eksposur, yang sebagian besar berkaitan dengan dinamika kebijakan, perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan, serta isu-isu sensitif seperti tata kelola kawasan, konflik pemanfaatan ruang, dan respons terhadap bencana.

Meski demikian, dominasi sentimen positif menunjukkan bahwa narasi kehutanan sepanjang 2025 lebih banyak dibingkai sebagai kerja negara yang hadir, bertahap, dan berorientasi pada pemulihan serta keberlanjutan, dibandingkan sebagai isu konflik semata. Masih terdapat banyak catatan mengingat target yang dibebankan untuk pemberitaan positif belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Persentase berita negatif yang hampir mencapai 30% menandakan masih banyak hal yang harus diperbaiki kedepan, tidak hanya soal publikasi semata melainkan juga kinerja secara keseluruhan untuk mendorong upaya perbaikan dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Bulan	Positif	Netral	Negatif	Total Berita	% Positif
Januari	3.227	352	1.043	4.622	69,80%
Februari	4.377	87	1.478	5.942	73,70%
Maret	978	316	605	1.899	51,50%
April	628	249	320	1.197	52,50%
Mei	665	402	319	1.386	48,00%
Juni	1.133	986	589	2.708	41,80%
Juli	1.765	716	549	3.030	58,30%
Agustus	9.546	28	2.555	12.129	78,70%
September	6.267	225	3.084	9.576	65,40%
Oktober	5.784	2.874	2.639	11.297	51,20%
November	8.283	2.999	4.021	15.303	54,10%
Desember	3.120	5.133	5.822	14.075	22,16%

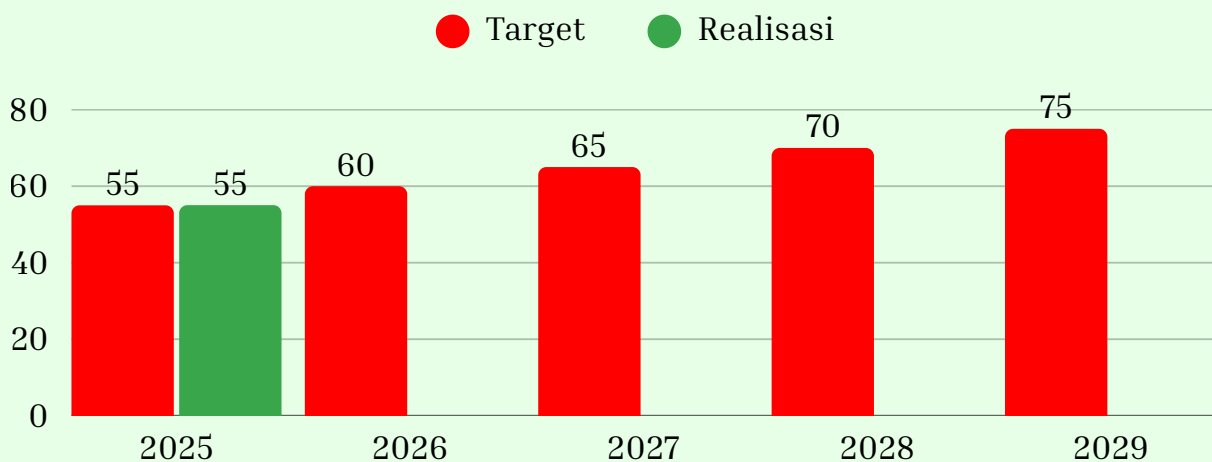
Secara umum, pemberitaan positif bidang kehutanan telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 55%. Merujuk pada tabel di atas, terdapat 7 bulan dimana capaian persentase pemberitaan positif kurang dari 55%. Pertama adalah pada bulan Maret dan April dimana kami hanya mendapatkan 51,5% dan 52,5%. Pada periode ini, terdapat sentimen negatif terhadap pemberitaan honor FOLU yang menjadi atensi publik.

Periode selanjutnya adalah Mei dan Juni dimana pemberitaan positif kembali menurun hingga ke level 41%. Pada bulan Juni, terjadi polemik terkait tambang di Raja Ampat dan kecelakaan turis Brasil di TN Gunung Rinjani yang memengaruhi persepsi publik terhadap kehutanan.

Bulan Juli, Agustus, dan September, pemberitaan kembali positif dimana Kemenhut mencatat berita positif tertinggi dengan capaian 78,7% di Agustus. Pada bulan September terjadi lonjakan pemberitaan negatif yang dikaitkan dengan framing interaksi Menteri dengan eks tersangka pembalakan liar, namun secara persentase masih positif yang didominasi oleh keberhasilan Kemenhut dalam penanganan karhutla dan Tesso Nilo. Pemberitaan positif kembali menurun di bulan Oktober dan November, dan mencapai puncaknya dibulan Desember dimana terjadi bencana banjir Sumatera yang membawa material kayu gelondongan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Indikator kinerja kegiatan Pemberitaan Positif di Media Massa merupakan bagian penting dalam pencapaian indikator kinerja program Sekretariat Jenderal Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Sekretariat Jenderal Kemenhut melalui layanan pemberitaan dan publikasi pada Biro HKLN berupa pemberitaan positif di media massa, merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja Kemenhut kepada publik. Berita positif adalah berita yang memiliki kecenderungan atau pesan utama mendukung kebijakan Kemenhut. Perwujudan pemberitaan yang positif merupakan hal yang menjadi prioritas tidak hanya sebagai kinerja semata, namun juga cara membangun reputasi, relasi, serta kepercayaan publik kepada Kementerian Kehutanan dalam mengelola lingkup kehutanan di Indonesia.

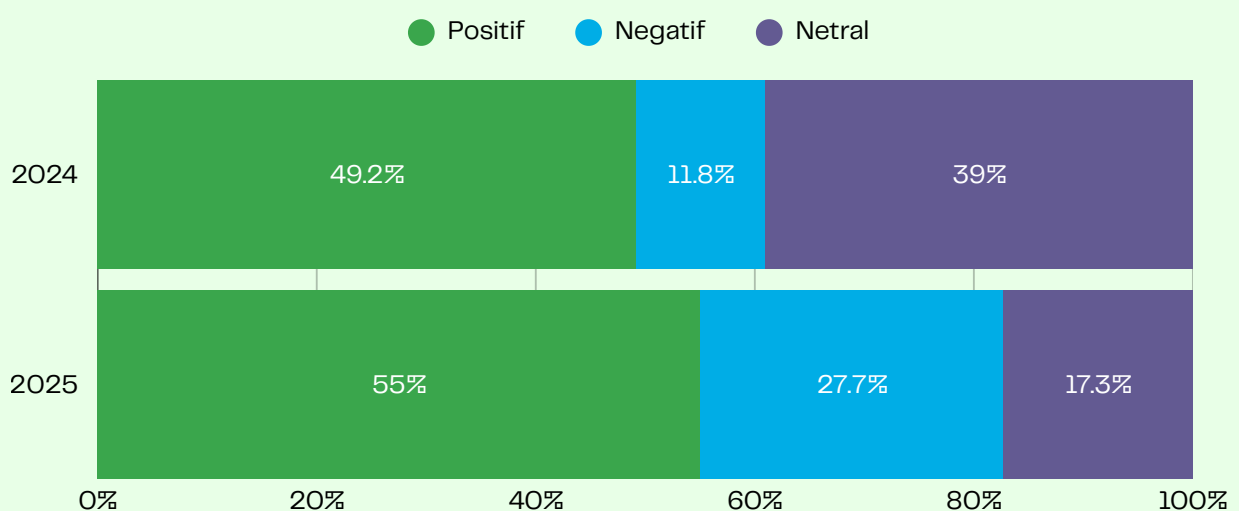
Renstra 2025-2029 mencatat target pemberitaan positif sebesar 55% untuk tahun 2025. Capaian realisasi persentase pemberitaan positif pada tahun 2025 mencapai 55,04%, melampaui target Renstra yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa tren pemberitaan positif yang tinggi serta diterima pula secara positif oleh publik terus meningkat seiring waktu berjalan, memenuhi target-target yang telah ditetapkan sebelumnya demi terwujudnya sentimen positif publik serta kinerja yang disupport oleh khalayak publik.



Grafik Perbandingan Pemberitaan Positif dengan target Renstra 2025-2029 (dalam persentase)

Pada tahun 2025, Persentase Pemberitaan Positif di Media Massa ditargetkan sebesar 55%, dengan realisasi capaian IKK 1.2 sebesar 55,04, melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Pemberitaan positif tersebut bersumber dari media daring yang mengangkat berbagai program dan kebijakan Kementerian Kehutanan, khususnya terkait upaya pencegahan dan penanganan bencana alam. Pada bulan Desember, meningkatnya pemberitaan mengenai bencana alam yang menyoroti pengelolaan kawasan hutan dan peran Kementerian Kehutanan dalam mitigasi dan rehabilitasi lingkungan menyebabkan adanya pemberitaan yang bersifat kritis, meskipun tetap diimbangi dengan informasi positif mengenai langkah respons, koordinasi, dan komitmen kementerian dalam menjaga kelestarian hutan dan fungsi lingkungan.

Jika dibandingkan dengan statistik pemberitaan positif tahun 2024, persentase pemberitaan positif di tahun 2025 memiliki angka 5,8% lebih tinggi dengan angka pemberitaan positif tahun 2024 sebesar 49,2%. Dalam pencapaian angka pemberitaan positif 2025, Biro HKLN telah ikut bekerjasama dengan beberapa media seperti Solopos, Detikcom, dan Kompas sebagai upaya untuk menghasilkan informasi positif bidang kehutanan. Di saat yang sama, terdapat banyak kejadian pada tahun 2025 yang menyebabkan persentase berita negatif lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang menjadi kendala signifikan dalam realisasi target kinerja pemberitaan positif.



Grafik Perbandingan Pemberitaan tahun 2024-2025

3.1.3. KESEPAKATAN KERJA SAMA

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan interkoneksi yang semakin erat, tantangan-tantangan di sektor kehutanan tidak lagi mengenal batas yurisdiksi nasional. Isu-isu krusial seperti hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, hingga polusi lintas batas, secara inheren bersifat transnasional. Kompleksitas dan skala permasalahan ini meniscayakan bahwa tidak ada satu negara pun, termasuk Indonesia, yang mampu mengatasinya secara unilateral. Oleh karena itu, kerja sama luar negeri menjadi sebuah imperatif strategis, bukan sekadar pilihan, bagi Kemenhut dalam menjalankan mandatnya.

Melalui jalinan kerja sama internasional, Kemenhut memperoleh akses vital terhadap berbagai sumber daya yang esensial untuk mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran strategisnya. Hal ini mencakup pertukaran pengetahuan (*knowledge sharing*), transfer teknologi mutakhir, adopsi praktik-praktik terbaik (*best practices*) global, hingga mobilisasi sumber pendanaan alternatif. Dengan demikian, kolaborasi internasional berfungsi sebagai katalisator yang memungkinkan Kemenhut untuk merespons tantangan kehutanan secara lebih efektif, efisien, dan inovatif, serta mempercepat realisasi program-program prioritas nasional yang telah dicanangkan.

Lebih dari sekadar menjadi penerima manfaat, Indonesia, melalui Kemenhut, memposisikan diri sebagai mitra sejajar dan kontributor aktif dalam kancah global. Prinsip kesetaraan (*mutual respect and partnership*) menjadi landasan fundamental dalam setiap inisiatif kerja sama. Pendekatan ini memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek yang turut memengaruhi dan membentuk agenda kehutanan internasional. Dengan demikian, setiap bentuk kerja sama dapat diarahkan untuk secara optimal mendukung dan melindungi kepentingan nasional, termasuk kedaulatan atas sumber daya alam dan agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Keterlibatan aktif Kemenhut dalam forum dan mekanisme kerja sama luar negeri juga berkontribusi pada penguatan tata kelola lingkungan global dan peningkatan citra positif Indonesia di mata dunia. Upaya kolektif ini tidak hanya berdampak pada penyelesaian isu-isu kontemporer, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kokoh untuk keberlanjutan lingkungan dan ketahanan ekologis di masa depan. Pada akhirnya, kerja sama internasional yang terencana dan terarah menjadi investasi strategis bagi Indonesia untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka panjang.

Menyadari peran strategis ini, cita-cita Kemenhut untuk dapat berkontribusi secara signifikan tidak hanya pada isu kehutanan dan lingkungan hidup di tingkat domestik, tetapi juga dalam percaturan global, secara konkret dituangkan dalam sasaran strategis: “Meningkatnya Layanan Kerja Sama Luar Negeri Yang Efektif dan Efisien”. Sasaran ini menggarisbawahi bahwa kerja sama luar negeri bukan lagi aktivitas yang terisolasi atau hanya relevan bagi unit kerja tertentu, melainkan harus menjadi pengungkit dan pendukung bagi keseluruhan agenda dan program prioritas Kementerian.

Untuk memastikan sasaran strategis tersebut terukur dan dapat dievaluasi, ditetapkanlah indikator kinerja utama berupa “Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri”.



Sasaran Kegiatan

Meningkatnya layanan kerja sama luar negeri yang efektif dan efisien

Kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kehutanan

Indikator Kinerja Kegiatan

Kerja sama luar negeri merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui kerja sama dengan berbagai negara dan lembaga internasional, Indonesia berupaya menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi hutan, dan pelestarian keanekaragaman hayati, sekaligus memperkuat pembangunan kehutanan di dalam negeri. Kerja sama Luar Negeri ini memberikan manfaat nyata bagi sektor kehutanan, antara lain melalui dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik. Dukungan tersebut membantu mempercepat pelaksanaan program kehutanan di lapangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Kerja Sama Luar Negeri bidang kehutanan sepanjang tahun 2025 dilakukan melalui kerangka kerja sama bilateral dan kerangka kerja sama multilateral. Kerja sama bilateral dikembangkan melalui kemitraan langsung dengan negara mitra untuk mendukung pelaksanaan program kehutanan. Sementara itu, kerja sama multilateral dilaksanakan melalui keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi dan forum internasional guna memperkuat posisi dan peran Indonesia dalam pembahasan kebijakan kehutanan global, pengembangan standar bersama, serta peningkatan sinergi antarnegara untuk mendukung pelaksanaan program kehutanan.

Melalui kedua kerangka kerja sama luar negeri tersebut, sektor kehutanan Indonesia memperoleh manfaat yang saling melengkapi. Kerja sama bilateral berkontribusi pada percepatan pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak melalui dukungan teknis dan pendanaan yang lebih langsung, sedangkan kerja sama multilateral memperkuat kerangka kebijakan, koordinasi lintas negara, serta mobilisasi dukungan internasional yang lebih luas bagi pembangunan kehutanan.



Pada Tahun 2025, kinerja kerja sama luar negeri bidang kehutanan diukur melalui target terwujudnya 5 (lima) kesepakatan kerja sama yang tercantum dalam perjanjian kinerja Biro Hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri. Penetapan target ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama luar negeri berjalan secara terencana, terukur, dan memberikan kontribusi yang dapat mendukung pembangunan kehutanan nasional. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Sepanjang tahun 2025 berhasil mencapai 20 kesepakatan kerja sama luar negeri, atau 400% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan intensitas kerja sama luar negeri meningkat, serta tingginya kepercayaan mitra global terhadap komitmen Indonesia dalam pengelolaan hutan.

Kesepakatan kerja sama yang dihasilkan mencakup berbagai bidang strategis, antara lain pengelolaan hutan lestari, upaya pengendalian perubahan iklim melalui perhutanan sosial, pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan konservasi, perdagangan karbon, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Keseluruhan kerja sama luar negeri tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian kerja sama luar negeri bidang kehutanan pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Kerja sama luar negeri menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan efektivitas program, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang lingkungan dan kehutanan.

Cooperation Arrangement between Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia and Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry of the Australian Government on Forestry

Pada tanggal 1 Agustus 2025, Kemenhut dan Departemen Agrikultur, Perikanan, dan Kehutanan Australia (DAFF) menandatangani *Cooperation Arrangement*(CA) berjudul *Cooperation Arrangement between Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia and Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry of the Australian Government on Forestry*. CA memuat beberapa kesepakatan salah satunya tentang pembentukan Kelompok Kerja Kehutanan antara Indonesia dan Australia (Australia Indonesia Working Group on Forestry) untuk pembentukan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kehutanan dan DAFF.

Objective/Tujuan dari kerja sama ini adalah:

- 1.Meningkatkan konsultasi dan kerja sama dalam masalah kehutanan yang menjadi kepentingan bersama, termasuk perdagangan dan keterlibatan regional;
- 2.Memfasilitasi pengembangan Nota Kesepahaman (MoU) antara MoFor dan DAFF di sektor kehutanan;
- 3.Memfasilitasi pertukaran informasi berdasarkan kesetaraan dan manfaat bersama;
- 4.Membantu penyelesaian masalah perdagangan bilateral terkait kehutanan;
- 5.Mempromosikan dialog mengenai isu-isu hutan global, termasuk pembalakan liar (*illegal logging*).



Declaration of Intent (DoI) RI–Prancis di Bidang Kehutanan Lestari

Declaration of Intent (DoI) ini merupakan pernyataan kehendak bersama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Kementerian Transisi Ekologi, Keanekaragaman Hayati, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Republik Prancis untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang kehutanan lestari. DoI ini menjadi tindak lanjut dari Deklarasi Bersama Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Prancis mengenai kemitraan strategis bilateral hingga tahun 2050 yang diadopsi pada 28 Mei 2025 di Jakarta, serta menegaskan komitmen kedua negara dalam mendukung penghentian deforestasi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan penguatan peran hutan dalam mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Deklarasi ini berfungsi sebagai payung kerja sama yang membuka peluang pengembangan program teknis dan kebijakan di masa mendatang.

Untuk implementasi kerja sama, *Declaration of Intent* ini perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah perjanjian turunan yang bersifat lebih operasional. Perjanjian turunan tersebut sekurang-kurangnya harus mengatur secara jelas komitmen pendanaan, lokasi kerja sama, penetapan *Executing Agency*, serta pengaturan teknis lainnya yang diperlukan agar pelaksanaan kerja sama sejalan dengan mandat dan prioritas Kementerian Kehutanan.

Tujuan dari kerja sama ini adalah:

1. Memperkuat dan memperluas kerja sama bilateral di sektor kehutanan lestari
2. Mendukung upaya penghentian deforestasi dan degradasi hutan pada tahun 2030
3. Melestarikan ekosistem penting dan keanekaragaman hayati
4. Mendorong penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat lokal





Partnership for Investment in Sustainable Landscapes: Enabling Natural Capital Assets for FOLU Net Sink 2030 (KIBAR)

Kerja sama KIBAR merupakan salah satu inisiatif kemitraan bilateral antara Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Inggris lewat *Foreign, Commonwealth, & Development Office* (FCDO) dalam mendukung agenda strategis FOLU Net Sink 2030. Program ini dirancang untuk menjembatani kebijakan pengelolaan hutan lestari dengan upaya peningkatan nilai ekonomi modal alam melalui pendekatan bentang alam terpadu, sekaligus mendorong masuknya investasi publik dan swasta yang berkelanjutan di sektor kehutanan. Kerja sama ini ditandatangani tanggal 28 Agustus 2025 dan berlangsung sampai Maret 2027.

Saat ini, PSC meeting telah dilaksanakan pada 4 Desember 2025. Pada pertemuan tersebut telah ditetapkan AWP untuk masing-masing *Implementing Agency*, namun demikian, kegiatan masih dalam tahap persiapan awal implementasi.

KIBAR diarahkan untuk mendorong penguatan mekanisme investasi publik dan swasta di sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dengan menempatkan pengelolaan lanskap berkelanjutan sebagai kerangka utama. Lokasi pelaksanaan mencakup sejumlah provinsi strategis, antara lain Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua Barat, serta beberapa kawasan taman nasional yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi penting.

Pada tahun 2025, proyek KIBAR telah ditandatangani dan memasuki tahap awal implementasi. Anggaran *Annual Work Plan* (AWP) 2025 telah ditetapkan sebesar Rp11,9 miliar. Kegiatan pada tahap awal difokuskan pada penyiapan tata kelola proyek, pembentukan mekanisme koordinasi lintas unit di lingkungan Kementerian Kehutanan, serta penyelarasan agenda program dengan kebijakan nasional dan rencana pembangunan daerah.



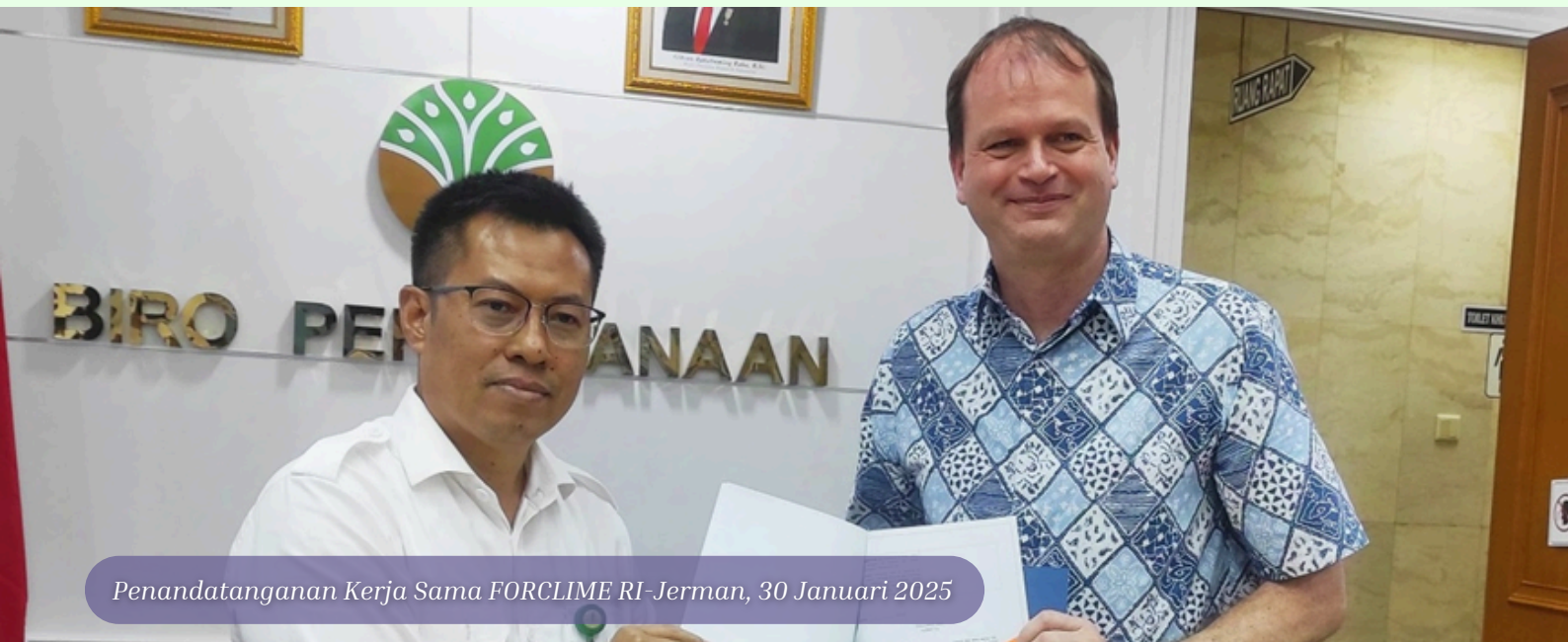
Cooperation to Support Sustainable Forest Management and Trade in Legally and Sustainably Harvested Forest Products (MFP 5)

Cooperation to Support Sustainable Forest Management and Trade (MFP-5) merupakan kelanjutan dari rangkaian kerja sama kehutanan antara Indonesia dan Inggris yang telah berlangsung sejak *MFP Phase 1* hingga *Phase 4*. Program MFP secara historis telah berkontribusi signifikan terhadap reformasi tata kelola kehutanan di Indonesia, khususnya dalam penguatan kebijakan legalitas hasil hutan dan perdagangan kayu berkelanjutan.

MFP-5 ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2025 sebagai kelanjutan dukungan FCDO Inggris terhadap agenda pengelolaan hutan lestari Indonesia. Program ini dirancang untuk memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan kredibilitas sistem legalitas hasil hutan, serta mendukung posisi Indonesia dalam perdagangan global produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan nasional, MFP-5 juga diposisikan untuk mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 melalui penguatan kerangka kebijakan dan kolaborasi multipihak.

Pada tahun 2025, MFP-5 masih berada pada tahap persiapan pelaksanaan. Fokus kegiatan pada periode ini mencakup penyiapan kerangka kerja program, konsolidasi internal di lingkungan Kementerian Kehutanan, serta penyelarasan program dengan kebijakan nasional yang relevan, termasuk kebijakan terkait Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan perdagangan hasil hutan.

Status terkini menunjukkan bahwa MFP-5 sedang mempersiapkan pelaksanaan *Project Steering Committee (PSC)* pertama yang direncanakan pada awal Januari 2026. Pertemuan PSC tersebut akan menjadi forum pengambilan keputusan awal untuk menetapkan *Overall Work Plan (OWP)* dan *Annual Work Plan (AWP)* sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada fase implementasi. Tahapan persiapan ini merupakan bagian dari proses penataan tata kelola program sebelum kegiatan operasional dilaksanakan, serta dimaksudkan untuk memastikan keselarasan program dengan kebijakan dan prioritas Kementerian Kehutanan.



Penandatanganan Kerja Sama FORCLIME RI-Jerman, 30 Januari 2025

Forests and Climate Protection Programme (FORCLIME) – Technical Cooperation Module

FORCLIME merupakan kerja sama bilateral jangka panjang antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang secara konsisten mendukung penguatan pengelolaan hutan lestari dan tata kelola kehutanan. Melalui modul kerja sama teknis, program ini berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, mendukung kebijakan kehutanan nasional, serta memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Wilayah sasaran meliputi Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, dan Papua Selatan, yang memiliki karakteristik ekologi dan sosial yang kompleks serta memerlukan pendekatan kebijakan yang kontekstual.

Kerjasama ini ditandatangani tanggal 30 Januari 2025 dan akan berlangsung sampai tahun 2028. Saat ini program telah berjalan dengan realisasi anggaran sampai Triwulan III Tahun 2025 sebesar 35 %.

Tujuan dari kerja sama ini diantaranya:

1. Mendukung pengelolaan hutan lestari
2. Memperkuat tata kelola kehutanan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kehutanan di tingkat nasional dan daerah

Pada tahun 2025, proyek telah berjalan dengan realisasi anggaran lebih dari Rp18 miliar. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup dukungan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta fasilitasi koordinasi multipihak. Dalam rangka penguatan tata kelola program, telah ditetapkan Tim Pengarah Program (*Programme Steering Committee/PSC*) dan Komite Teknis Program (*Project Technical Committee/PTC*) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 22 Tahun 2025. Pertemuan PSC dan PTC FORCLIME telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 dengan agenda koordinasi kelembagaan serta pembahasan kegiatan FORCLIME tahun 2025.



Exchange of Letter Amandemen MoU Indonesia–United Kingdom

MoU Indonesia–UK yang ditandatangani pada Oktober 2022 telah menjadi landasan utama kerja sama bilateral di bidang kehutanan dan FOLU Net Sink 2030. Seiring dengan kemajuan implementasi program dan diskusi teknis yang berkembang, khususnya melalui Kemitraan untuk Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR) dan *Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP-5)*, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dan masa berlaku MoU.

Selain itu, arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat agenda konservasi satwa liar, khususnya konservasi gajah, menjadi pertimbangan strategis dalam memperluas fokus kerja sama di bawah MoU tersebut. Penyesuaian ini juga memberikan ruang waktu yang lebih memadai untuk perencanaan dan implementasi kegiatan secara berkelanjutan pasca penataan kelembagaan sektor kehutanan.

Dengan berlakunya struktur kelembagaan baru, implementasi MoU dan proyek turunannya selanjutnya dikoordinasikan oleh Kementerian Kehutanan, dengan penajaman fokus pada pengelolaan hutan lestari, konservasi sumber daya hutan, dan dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030.

Beberapa perubahan yang disepakati diantaranya:

1. Penambahan Ruang Lingkup Substansi

Ditambahkan ketentuan baru pada Pasal 2.1 MoU, yaitu poin (c), yang secara eksplisit mencakup:

“Strengthening elephant conservation in Peusangan, Aceh.”

Penambahan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang terintegrasi dengan pengelolaan hutan lestari.

2. Perpanjangan Masa Berlaku MoU

Masa berlaku MoU diperpanjang selama lima tahun, dari semula berakhir pada 21 Oktober 2027 menjadi 21 Oktober 2032, guna memberikan fleksibilitas dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan kegiatan kerja sama kehutanan jangka menengah–panjang.



Exchange of Letter Perpanjangan MoU Indonesia–Norwegia (RBC)

Kemitraan Indonesia–Norwegia merupakan kerja sama strategis jangka panjang yang berfokus pada pembayaran berbasis hasil (RBC) atas capaian penurunan emisi dari sektor kehutanan. Seiring dengan berlanjutnya agenda FOLU Net Sink 2030 dan kebutuhan menjaga kesinambungan kerangka hukum kerja sama, para pihak menyepakati perlunya perpanjangan MoU payung.

Perpanjangan ini juga mempertimbangkan dinamika kebijakan nasional Indonesia, termasuk penataan kelembagaan sektor kehutanan serta kebutuhan untuk memastikan bahwa mekanisme RBC tetap relevan, kredibel, dan selaras dengan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) nasional.

Pasca pemisahan fungsi lingkungan hidup dan kehutanan, pelaksanaan kemitraan Indonesia–Norwegia, khususnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan FOLU, berada dalam koordinasi Kementerian Kehutanan. Hal ini memperkuat fokus kerja sama pada pengelolaan hutan lestari dan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi nasional dari sektor kehutanan.

Beberapa perubahan yang disepakati diantaranya:

1. Perpanjangan Masa Berlaku MoU

MoU yang sebelumnya berlaku hingga 2027 diperpanjang hingga 31 Desember 2030, tanpa mengubah prinsip dasar kemitraan berbasis hasil.

2. Penegasan Mekanisme RBC

Exchange of Letter menegaskan kembali bahwa kerja sama tetap menggunakan pendekatan RBC, dengan implementasi teknis mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang telah disepakati sebelumnya, serta disesuaikan dengan kebijakan kehutanan nasional yang berlaku.

Perjanjian Multilateral

Berikut adalah kesepakatan dalam kerangka kerja sama multilateral yang ditandatangani di tahun 2025:

1 . GEF-7 *Bamboo project: Protection of Biodiversity and Sustainable Land-use in Conservation Landscapes in South Sulawesi, Gorontalo and East Nusa Tenggara*

Kerjasama ini dilaksanakan dengan *Global Environment Facility* (GEF) dengan Ditjen KSDAE. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 dan berlaku selama 7 tahun dari tahun 2025-2032.

2. ITTO PP-A/54-331A *Promoting Quality Timber Production in Smallholders and Community-based Teak and Other Valuable Species Plantations in the Tropics*

Kerjasama ini dilaksanakan dengan *International Tropical Timber Organization* (ITTO) dengan Ditjen PHL. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025 dan berlaku selama 1 tahun dari tahun 2025-2026.

3. ITTO PD 943/25 (I) *Enhancing Legal & Sustainable Supply Chain in Wood Industry to Stimulate Good Forestry Governance*

Kerjasama ini dilaksanakan dengan *International Tropical Timber Organization* (ITTO) dengan Ditjen PHL. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025 dan berlaku selama 1 tahun dari tahun 2025-2026.

4. Program kerja sama untuk mendukung konservasi orang utan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia

Kerjasama ini dilaksanakan dengan *Orangutan Foundation - United Kingdom* (OF-UK) dengan Ditjen KSDAE. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 dan berlaku selama 3 tahun dari tahun 2025-2028.

5. *Strengthening Capacity for Management of Invasive Alien Species in Indonesia* (SMIAS)

Kerjasama ini dilaksanakan dengan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dengan Ditjen KSDAE. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 dan 17 Juli 2025. Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun dari tahun 2025-2030.

6. *Strengthening Sustainability in commodity and Food Systems, Land Restoration and Land Use Governance Through Integrated Landscape Management for Multiple Benefits in Indonesia* (FOLUR)

Kerjasama ini dilaksanakan dengan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dengan Kemenko Pangan sebagai *Executing Agency* dan Ditjen KSDAE sebagai *Implementing Agency*. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 dan 17 Juli 2025. Kerjasama ini berlaku selama 3 tahun dari tahun 2025-2028.

7. Program kerja sama untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia

Kerjasama ini dilaksanakan dengan *Fauna and Flora International* (FFI) dengan Ditjen KSDAE. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 dan 4 September 2025. Kerja sama ini berlaku selama 3 tahun dari tahun 2025-2028.

8. MoU *between Ministry of Forestry, Republic of Indonesia and International Emissions Trading Association (IETA) on Carbon Market Capacity Building*

Kerjasama ini dilaksanakan dengan IETA dengan Setjen. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 dan 25 November. Kerja sama ini berlaku selama 1 tahun dari tahun 2025-2026.

9. MoU *between Ministry of Forestry, Republic of Indonesia and The Integrity Council for the Voluntary Carbon Markets (ICVCM) concerning Support on High-Integrity Voluntary Carbon Market Development in Indonesia*

Kerjasama ini dilaksanakan dengan ICVCM dengan BP2SDM. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025 dan 9 Desember 2025. Kerja sama ini berlaku selama 2 tahun dari tahun 2025-2027.

10. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan *The Aspinnall Foundation (TAF) Tentang Konservasi Primata Dilindungi di Indonesia*

Kerjasama ini dilaksanakan dengan TAF dengan Ditjen KSDAE. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 17 dan 29 Desember 2025 dan berlaku selama 3 tahun dari tahun 2025-2028.

11. *Project Technical Arrangement (PTA) between Ministry of Forestry, Republic of Indonesia and Global Green Growth Institute (GGGI) concerning Nature-Based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (Nasclim) Project*

Kerjasama ini dilaksanakan dengan GGGI dengan Setdit PDASRH sebagai *Executing Agency* dan Dit. RM dan Dit. BRPH sebagai *Implementing Unit*. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 2025 dan berlaku selama 3 tahun dari tahun 2025-2028.

12. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan *Frankfurt Zoological Society (FZS) Tentang Konservasi Satwa Liar dan Habitatnya*

Kerjasama ini dilaksanakan dengan FZS dengan KSDAE. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 1 dan 8 Desember 2025 dan berlaku selama 3 tahun dari tahun 2025-2028.

13. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan *Wildlife Conservation Society (WCS) Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Habitat*

Kerjasama ini dilaksanakan dengan WCS dengan KSDAE. Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2025 dan berlaku selama 3 tahun dari tahun 2025-2028.



Penandatanganan MoU Antara Kemenhut dengan IETA

Melalui kerangka kerja sama bilateral, Indonesia berhasil memperkuat kemitraan strategis dengan sejumlah negara mitra utama, antara lain Jerman, Norwegia, Prancis, Inggris, dan Australia. Kesepakatan yang ditandatangani dalam berbagai bentuk dokumen perjanjian. Kerja sama bilateral ini difokuskan pada perlindungan hutan dan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan, pengelolaan hutan lestari, perdagangan hasil hutan yang legal dan berkelanjutan, serta investasi lanskap berkelanjutan untuk mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030.

Beberapa kerja sama bilateral memiliki jangka waktu menengah hingga panjang, seperti kemitraan dengan Norwegia yang berlaku hingga tahun 2030 serta kerja sama dengan Inggris yang mencakup periode hingga tahun 2032. Hal ini menunjukkan kesinambungan dukungan internasional terhadap agenda kehutanan Indonesia serta kepercayaan mitra dalam mendukung kebijakan dan program strategis sektor kehutanan.

Selain itu, melalui kerja sama multilateral pada tahun 2025 juga menunjukkan penguatan peran Indonesia dalam berbagai inisiatif global. Kesepakatan multilateral melibatkan organisasi dan lembaga internasional seperti *Global Environment Facility (GEF)*, *International Tropical Timber Organization (ITTO)*, *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *International Emissions Trading Association (IETA)*, *Integrity Council for the Voluntary Carbon Markets (ICVCM)*, *Global Green Growth Institute (GGGI)*, serta organisasi konservasi internasional. Kerja sama ini mendukung pelaksanaan proyek konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan lanskap terpadu, pengendalian spesies invasif, penguatan tata kelola industri kehutanan, serta pengembangan pasar karbon yang berintegritas.

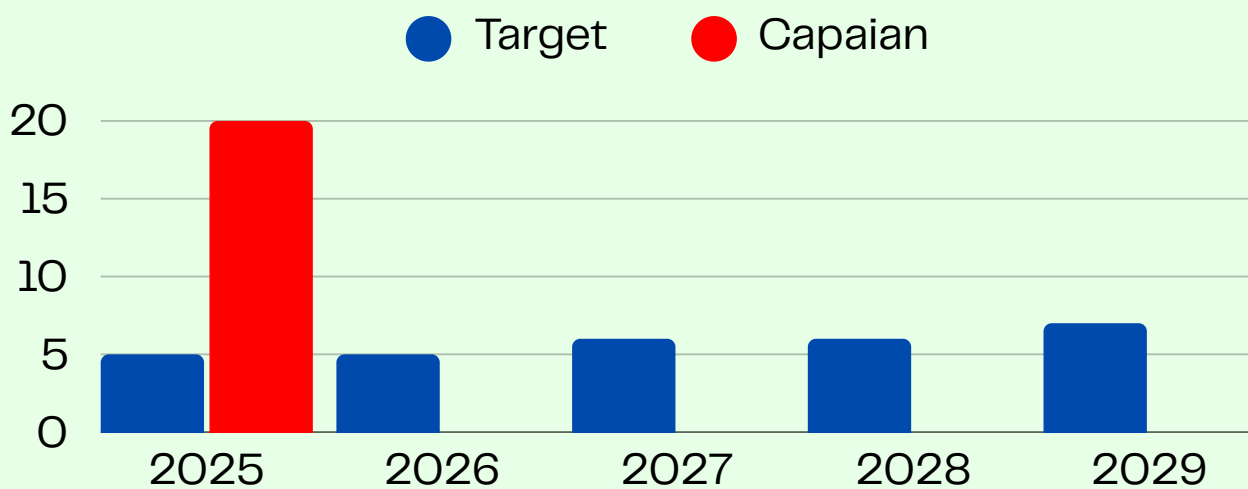
Sebagian besar kerja sama multilateral bersifat proyek dan program tematik dengan masa berlaku antara satu hingga tujuh tahun, yang memungkinkan implementasi kegiatan secara berkelanjutan dan terukur. Fokus kerja sama tidak hanya pada aspek kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.

Sasaran meningkatnya layanan kerja sama luar negeri yang efektif dan efisien diukur melalui indikator jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kehutanan, dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebanyak 7 kesepakatan. Pada Tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 20 kesepakatan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja telah tercapai dan melampaui target Renstra lebih awal (early achievement). Hal ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam penyelenggaraan layanan kerja sama luar negeri, serta meningkatnya efektivitas koordinasi, kepercayaan, dan dukungan pendanaan dari mitra internasional terhadap sektor kehutanan Indonesia.

Meskipun capaian tahun 2025 menunjukkan keberhasilan kuantitatif perlu diikuti dengan penguatan aspek kualitas dan implementasi kerja sama. Dengan tercapainya target Renstra sebelum periode berakhir, fokus kinerja pada tahun-tahun berikutnya diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan kesepakatan yang telah terbangun, peningkatan keterlaksanaan program, serta pemantauan kontribusi nyata kerja sama terhadap pencapaian outcome pembangunan kehutanan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 terhadap indikator kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kehutanan berada pada kategori sangat memuaskan, dan menjadi dasar untuk penajaman strategi pelaksanaan kerja sama pada sisa periode Renstra guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan manfaat kerja sama hingga Tahun 2029.



Tabel Perbandingan Realisasi Kerjasama Luar Negeri dengan Target Renstra

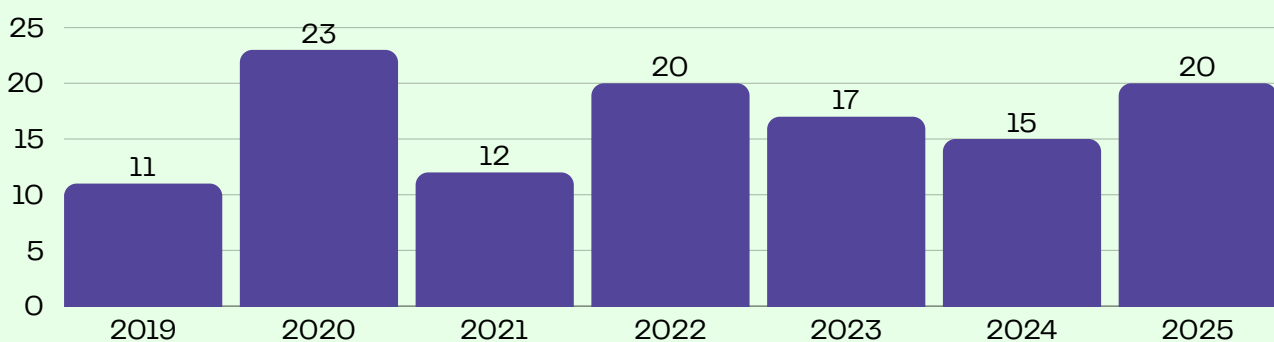
Jika dibandingkan dengan output pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat perbedaan pada indikator kinerja kegiatan kerja sama luar negeri (KSLN). Renstra Tahun 2020-2024 menetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan KSLN merupakan dokumen hasil analisis kerja sama bilateral, multilateral, dan ormas asing yang berjumlah 30 dokumen. Sementara Renstra Tahun 2025-2029 menetapkan indikator kinerja kegiatan adalah Kesepakatan kerjasama luar negeri bidang kehutanan berjumlah 5 kesepakatan. Perbedaan indikator ini berimplikasi pada perbedaan objek dan cara pengukuran output kinerja KSLN sehingga kedua indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan secara *apple-to-apple*.

Di saat yang sama, Biro HKLN telah secara rutin menyelenggarakan fasilitasi Hubungan Kerja Sama Luar Negeri semenjak instansi masih menjadi bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kesepakatan kerja sama luar negeri menjadi salah satu output yang secara konsisten dihasilkan setiap tahun oleh bagian Kerja Sama Luar Negeri sehingga dapat dibandingkan dengan output IKK tahun 2025. Perbedaan terdapat pada output kerjasama tahun 2020-2024 yang termasuk lingkungan hidup sementara tahun 2025 hanya untuk kerjasama kehutanan

Dalam Periode 2019 – 2025, terdapat 118 naskah perjanjian kerja sama luar negeri baru yang ditandatangani, dengan realisasi tahun 2025 mencapai 20 kesepakatan kerja sama baru. Perlu menjadi catatan bahwa data perjanjian tahun 2019-2024 juga mencakup kerjasama bidang lingkungan hidup. Angka realisasi ini menunjukkan konsistensi komitmen Biro dalam mewujudkan hubungan dan kerja sama luar negeri yang bermanfaat bagi negara.

Fokus kinerja pada tahun-tahun berikutnya diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan kesepakatan yang telah terbangun, peningkatan keterlaksanaan program, serta pemantauan kontribusi nyata kerja sama terhadap pencapaian outcome pembangunan kehutanan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 terhadap indikator kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kehutanan berada pada kategori sangat memuaskan, dan menjadi dasar untuk penajaman strategi pelaksanaan kerja sama pada sisa periode Renstra guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan manfaat kerja sama hingga Tahun 2029.



Tabel Kerjasama Luar Negeri 2019-2025

Upaya dan Kendala dalam Kerja Sama

Upaya utama Kementerian Kehutanan difokuskan pada intensifikasi atau peningkatan status dan cakupan kerja sama, kesinambungan kerja sama pasca restrukturisasi kelembagaan, penyesuaian EA, serta harmonisasi ruang lingkup kerja sama agar lebih fokus pada sektor kehutanan.

Kendala yang dihadapi meliputi antara lain:

- Perlunya penyesuaian terhadap dokumen perjanjian lama;
- Keterlambatan penetapan AWP;
- Belum tersedianya perjanjian turunan pada beberapa kesepakatan strategis (DoI Prancis dan MoU yang bersifat payung kerja sama);
- Perbedaan kepentingan dan kesiapan antar negara dalam menghadapi forum internasional;
- Perubahan organisasi yang berdampak pada penyesuaian struktur dan pergantian focal point, sehingga proses koordinasi dan kesinambungan pengawalan isu menjadi terhambat;
- Keterbatasan kapasitas SDM di Biro HKLN dan unit teknis terhadap isu perdagangan internasional;
- Belum tersedianya *template* penilaian dokumen usulan kerja sama yang baku, sehingga proses penelaahan membutuhkan waktu lebih lama.
- Dinamika perundingan perdagangan yang berjalan paralel menuntut kesiapan data dan analisis yang memadai untuk mendukung posisi Indonesia.
- Tindak lanjut hasil-hasil pertemuan ASEAN belum terpantau secara optimal, sehingga beberapa keputusan dan komitmen yang telah disepakati berisiko tidak terimplementasi secara konsisten;

Rekomendasi Perbaikan ke Depan

Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan diantaranya:

- Mempercepat penyusunan perjanjian turunan;
- Menyelaraskan seluruh kerja sama dengan mandat Kementerian Kehutanan pasca pemisahan kelembagaan;
- Memastikan setiap MoU payung memiliki dokumen perjanjian turunan untuk implementasi yang jelas melalui proyek konkret;
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan unit teknis agar masukan dapat disampaikan tepat waktu;
- Meningkatkan pemahaman unit teknis dan SDM HKLN terhadap isu kerja sama internasional, melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis;
- Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk kesepakatan kerja sama dan hasil-hasil pertemuan kerja sama luar negeri;
- Menyusun dan menerapkan *template* penilaian dokumen usulan kerja sama sebagai acuan bersama, sehingga alur kerja lebih efisien dan terstruktur;
- Mendokumentasikan hasil penelaahan dari kerja sama sebelumnya sebagai bahan rujukan untuk penanganan usulan berikutnya;

Outcome

- Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program kehutanan. Kesepakatan kerja sama luar negeri yang terbangun menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan kehutanan yang lebih terarah, terkoordinasi, dan berbasis dukungan internasional, sehingga meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan sektor kehutanan.
- Menguatnya dukungan internasional terhadap pengendalian perubahan iklim dan FOLU Net Sink 2030. Kerja sama bilateral dan multilateral memberikan kontribusi nyata dalam bentuk pendanaan, alih pengetahuan, dan penguatan kapasitas untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan secara berkelanjutan.
- Meningkatnya kualitas tata kelola kehutanan dan konservasi keanekaragaman hayati. Implementasi kesepakatan kerja sama mendorong penerapan praktik pengelolaan hutan lestari, penguatan perlindungan keanekaragaman hayati, serta peningkatan standar pengelolaan dan pengawasan sumber daya hutan.
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sektor kehutanan. Kerja sama luar negeri berkontribusi pada peningkatan kompetensi aparatur dan pemangku kepentingan melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pertukaran pengetahuan, sehingga memperkuat kapasitas nasional dalam pengelolaan hutan.
- Menguatnya posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama kehutanan global
- Tingginya capaian kesepakatan kerja sama meningkatkan kepercayaan mitra internasional serta memperkuat peran Indonesia sebagai mitra strategis dan rujukan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat regional dan global.



Partisipasi Indonesia pada London Climate Action Week (LCAW) di London



Partisipasi Indonesia pada 13th Session of AFoCO Assembly

2025
AFoCO Week

2025 AFoCO Week

20
AFoCO

27-30 October 2025 | Seoul, Republic of Korea



Proyek Kerja Sama Yang Sedang Berjalan (*On Going*)

Selain proyek yang ditandatangani pada tahun 2025, Kementerian Kehutanan juga melanjutkan pelaksanaan 4 (empat) proyek kerja sama luar negeri yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya dan masih berada pada fase implementasi aktif. Proyek-proyek ini memiliki karakteristik sebagai hibah berjalan (*on going grant*) dengan cakupan wilayah yang luas, periode pelaksanaan multi-tahun, serta keterkaitan langsung dengan kebijakan kehutanan nasional dan target FOLU Net Sink 2030.

On Going Proyek Kerja Sama Bilateral

Kerja Sama Kehutanan RI–Finlandia

Kerja sama kehutanan antara Indonesia dan Finlandia dilaksanakan berdasarkan *Memorandum of Understanding on Forestry and Natural Resources Management Cooperation* yang berlaku hingga tahun 2027. Kerja sama ini tidak menggunakan skema hibah, melainkan dilaksanakan berdasarkan prinsip *cost sharing* dan kemitraan setara.

Pada tahun 2025, kerja sama RI–Finlandia menunjukkan perkembangan signifikan melalui intensifikasi dialog kebijakan dan teknis. Pertemuan tingkat menteri, pertemuan teknis antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan perwakilan Kedutaan Besar Finlandia, serta pelaksanaan *Joint Sectoral Forestry Working Group* (JSFWG) pada Juni 2025 menjadi forum penting untuk menjajaki peluang kerja sama konkret di bidang bioekonomi, teknologi kehutanan, pengelolaan biomassa, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Meskipun belum menghasilkan proyek lapangan berskala besar, kerja sama ini telah berkontribusi pada penguatan pemahaman bersama dan penjajakan potensi investasi serta kerja sama teknis lanjutan. Tantangan utama ke depan adalah menerjemahkan hasil dialog dan kesepakatan sektoral ke dalam program atau kegiatan konkret yang dapat diimplementasikan sesuai dengan prioritas Kementerian Kehutanan.

Forest Programme IV: Watershed Mamasa/Sulawesi

Forest Programme IV dimulai pada tahun 2019 dengan dukungan hibah sebesar EUR 23,5 juta dari KfW Pemerintah Jerman dan direncanakan berakhir pada tahun 2026. Program ini berlokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamasa dan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan tujuan utama memperbaiki kondisi DAS melalui rehabilitasi hutan, pelestarian hutan primer, serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan.

Pada tahun 2025, *Forest Programme IV* masih berjalan dengan realisasi anggaran sebesar Rp21,6 miliar. Fokus kegiatan pada tahun berjalan meliputi rehabilitasi lahan kritis di wilayah hulu DAS, penguatan fungsi hidrologis DAS untuk mengurangi sedimentasi dan risiko banjir, serta penguatan mata pencaharian masyarakat melalui praktik agroforestri dan pertanian ramah lingkungan. Unit pelaksana utama program ini adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan.

Berdasarkan evaluasi internal, tantangan yang masih dihadapi mencakup koordinasi lintas tingkat pemerintahan, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta keberlanjutan hasil program pasca berakhirnya hibah pada tahun 2026. Dengan waktu pelaksanaan yang relatif terbatas, fokus pada tahun 2025 diarahkan pada konsolidasi hasil, penguatan kelembagaan lokal, dan penyiapan mekanisme keberlanjutan agar manfaat program dapat terus dirasakan setelah proyek berakhir.

Forest Programme V: Social Forestry Support Programme

Forest Programme V dimulai pada tahun 2019 dengan hibah sebesar EUR 11,5 juta dari KfW Pemerintah Jerman dan direncanakan berakhir pada tahun 2026. Program ini mendukung pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dengan menekankan keseimbangan antara aspek sosial, ekologis, dan ekonomi.

Pada tahun 2025, *Forest Programme V* masih berada pada tahap implementasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp12,4 miliar. Kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas kelompok perhutanan sosial, fasilitasi penyelesaian konflik tenurial, serta penguatan kelembagaan pengelola hutan di tingkat tapak. Program ini juga memberikan dukungan teknis bagi pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu dan produk kehutanan masyarakat.

Namun demikian, kompleksitas konflik tenurial dan keterbatasan akses pasar bagi produk perhutanan sosial masih menjadi tantangan utama. Selain itu, keberlanjutan dukungan teknis setelah berakhirnya proyek menjadi isu strategis yang perlu diantisipasi. Pada tahun 2025, Kementerian Kehutanan memfokuskan upaya pada penguatan kelembagaan lokal dan peningkatan kesiapan kelompok masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan hutan secara mandiri.

Forest Programme VI: Protection of Mangrove Forest (FP-VI)

Forest Programme VI (FP-VI) dimulai pada tahun 2020 dengan dukungan hibah dari KfW Pemerintah Jerman sebesar EUR 20 juta dan direncanakan berakhir pada tahun 2028. Program ini difokuskan pada perlindungan, rehabilitasi, dan pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Papua Barat, yang merupakan kawasan dengan tingkat kerentanan ekosistem pesisir yang tinggi.



Pada tahun 2025, FP-VI masih berada pada tahap implementasi dengan realisasi anggaran lebih dari Rp3,4 miliar. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan diarahkan pada pemeliharaan dan penguatan kawasan percontohan rehabilitasi mangrove, peningkatan kapasitas teknis pelaksana di daerah, serta fasilitasi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove berbasis ekosistem. Program ini juga mendukung integrasi pengelolaan mangrove dengan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks adaptasi perubahan iklim dan perlindungan wilayah pesisir.

Rantangan utama yang masih dihadapi meliputi konsistensi partisipasi masyarakat dalam jangka panjang, keterbatasan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam pemantauan dan pemeliharaan mangrove, serta kebutuhan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait di bidang perikanan, kelautan, dan tata ruang pesisir. Diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa capaian ekologis dan sosial dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

On Going Proyek Kerja Sama Multilateral

Berdasarkan data proyek kerja sama multilateral yang sedang berjalan, terdapat 22 proyek bidang kehutanan melibatkan berbagai mitra internasional, seperti ITTO, GEF, World Bank, FAO, AFoCO, GGGI, dan ormas asing (OFI, FFI, OF-UK, FZS, WCS, Aspinall). Sebagian besar on-going proyek tersebut menunjukkan bahwa dukungan dan kepercayaan mitra internasional terhadap agenda pembangunan kehutanan Indonesia tetap kuat.

Dari sisi pendanaan, nilai komitmen kerja sama cukup beragam. Beberapa proyek berskala teknis memiliki nilai yang relatif kecil, sementara proyek strategis bernilai besar berperan penting dalam mendorong dampak yang lebih luas.

Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) dari World Bank, misalnya, menjadi yang terbesar dengan nilai USD 19 juta, disusul sejumlah proyek GEF yang berfokus pada keanekaragaman hayati, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan lanskap secara terpadu. Jika dilihat dari jangka waktu pelaksanaan, mayoritas proyek dimulai sejak 2022 hingga 2025 dan akan berlangsung hingga 2026–2030. Hal ini mencerminkan kesinambungan kerja sama luar negeri di sektor kehutanan. Ke depan, tantangan utamanya adalah memastikan proyek kerja sama yang berjalan benar-benar memberikan manfaat nyata serta mendukung program prioritas sektor kehutanan dan nasional.

No	Nama Proyek	Mitra/ Donor	Tahun Mulai	Tahun Berakhir	Status Tahun 2025
1	ITTO PP-A/54-331A <i>Promoting Quality Timber Production in Smallholders and Community-based Teak and Other Valuable Species Plantations in the Tropics</i>	ITTO (International Tropical Timber Organization)	2025	2026	Berjalan
2	ITTO PD 943/25 (I) <i>Enhancing Legal & Sustainable Supply Chain in Wood Industry to Stimulate Good Forestry Governance</i>	ITTO (International Tropical Timber Organization)	2025	2026	Berjalan
3	<i>Enhancing The Implementation of Landscape Management of Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve (Gsk-Br) in Riau Province of Sumatera Island, Indonesia</i> ITTO – PD 712/13 Rev. 3 (F)	ITTO (International Tropical Timber Organization)	2023	2025	Berjalan
4	<i>Improved Local Community Livelihood through Increased Income from Non-Timber Forest Products (NTFP): Modelling Scalable Community Based Enterprise in Asia</i>	AFoCO (Asian Forest Cooperation Organization)	2023	2026	Berjalan
5	<i>Mangrove for Coastal Resilience (M4CR)</i>	World Bank	2022	2027	Berjalan
6	Konservasi Satwa Liar dan Ekowisata Berbasis Satwa Liar di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur, Indonesia	Copenhagen Zoo, Denmark	2023	2028	Berjalan
7	Program Kerja Sama untuk Mendukung Konservasi Orangutan Kalimantan di Indonesia	Orangutan Foundation International (OFI)	2023	2026	Berjalan
8	Program Kerja Sama untuk Mendukung Konservasi Orangutan dan Habitatnya secara Berkelanjutan di Indonesia	Orangutan Foundation United Kingdom (OF-UK)	2025	2028	Berjalan

No	Nama Proyek	Mitra/ Donor	Tahun Mulai	Tahun Berakhir	Status Tahun 2025
9	GEF-6 SSF: <i>Strengthening of Social Forestry in Indonesia</i>	<i>Global Environment Facility</i>	2021	2025	Berakhir 30 Juni 2025
10	GEF-7 INFLORES: <i>Investing in the Komodo Dragon and Other globally Threatened Species in Flores</i>	<i>Global Environment Facility</i>	2023	2029	Berjalan
11	GEF-7 CONSERVE: <i>Catalysing Optimum Management of Natural Heritage for Sustainability of Ecosystem, Resources and Viability of Endangered Wildlife Species</i>	<i>Global Environment Facility</i>	2022	2028	Berjalan
12	GEF-7 MEWLAFOR: <i>Maintaining and Enhancing Water Yield through Land and Forest Rehabilitation</i>	<i>Global Environment Facility</i>	2023	2026	Berjalan
13	GEF-7 CDSUI: <i>Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia (Output 1.5 related to Nagoya Protocol Implementation in Indonesia)</i>	<i>Global Environment Facility</i>	2022	2027	Berjalan
14	GEF-7 Bio-wallacea: <i>Protection of Biodiversity and Sustainable Land-use in Conservation Landscapes in South Sulawesi, Gorontalo and East Nusa Tenggara</i>	<i>Global Environment Facility</i>	2024	2030	Berjalan
15	GEF-7 FOLUR: <i>Food System and Land Use Restoration Impact Program: Strengthening sustainability in commodity and food systems, land restoration and land use governance through integrated landscape management for multiple benefits in Indonesia</i>	<i>Global Environment Facility</i>	2022	2027	Berjalan
16	GEF-7 SMIAS: <i>Strengthening Capacities for the Management of Invasive Alien Species in Indonesia</i>	<i>Global Environment Facility</i>	2022	2027	Berjalan

No	Nama Proyek	Mitra/ Donor	Tahun Mulai	Tahun Berakhir	Status Tahun 2025
17	Program Kerja Sama untuk Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia	<i>Fauna and Flora International (FFI)</i>	2025	2028	Berjalan
18	<i>Nature-Based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (NASCLIM)</i>	GGGI (<i>Global Green Growth Institute</i>)	2025	2028	Berjalan
19	<i>Development of an Information System on The Potensial of Wood and Carbon to Support Sustainable Forest Management in South Kalimantan, Indonesia</i> ITTO - PD 927/22 Rev.2 (F)	ITTO (<i>International Tropical Timber Organization</i>)	2024	2027	dihentikan sementara
20	Konservasi Satwa Liar dan Habitatnya	<i>Frankfurt Zoological Society (FZS)</i>	2025	2028	Berjalan
21	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Habitat	<i>Wildlife Conservation Society (WCS)</i>	2025	2028	Berjalan
22	Konservasi Primata Dilindungi di Indonesia	<i>The Aspinall Foundation (TAF)</i>	2025	2028	Berjalan

II. PENDING MATTERS YANG PERLU DITINDAKLANJUTI

No	Forum / Isu	Pending Matters Utama	Tindak Lanjut yang Diperlukan
1	UNFF	Persiapan partisipasi Indonesia pada UNFF-21 (2026)	Arahan pimpinan terkait kehadiran, side events, pameran dan inisiatif bersama; konsolidasi lintas unit dan interkem
2	COP UNFCCC	Implementasi hasil COP30 terkait kehutanan dan pasar karbon	Penataan tata kelola REDD+, RBP, perdagangan karbon sektor kehutanan, dan penguatan MRV
3	APEC EGILAT	Implementasi EGILAT <i>Policy Theme IV</i> (2026–2027)	Konsolidasi posisi Indonesia dan promosi SVLK; antisipasi hambatan non-tarif
4	COFO (FAO)	Tindak lanjut FAO <i>Forestry Roadmap</i> dan penyiapan publikasi SOIFO	Pengawasan posisi Indonesia dan prinsip <i>no one-size-fits-all</i> , serta penyiapan peluncuran SOIFO
5	FAO (LoI & IA)	Finalisasi <i>Letter of Intent</i> dan <i>Implementing Arrangement</i> proyek	Pembahasan lintas unit teknis dan keputusan pimpinan
6	GFOI	Pemanfaatan hasil GFOI untuk agenda nasional	Integrasi SIMONTANA, NFI, dan MRV untuk REDD+ dan pembiayaan iklim
7	CITES	Tindak lanjut keputusan CITES	Penyesuaian kebijakan nasional, penguatan NDF, dan penegakan hukum
8	UNEA	Implementasi resolusi UNEA	Sinkronisasi kebijakan nasional dengan MEAs terkait
9	FCPF-CF / RBP	Kelebihan ER dan implementasi BSP	Keputusan <i>call option waiver</i> , penetapan sistem registri, penunjukan Tim Penilai
10	BioCF / RBP	Negosiasi ERPA	Penyiapan tim negosiator
11	REDD+ & Karbon	Penataan kelembagaan pasca pemisahan KLH-Kemhut	Penugasan unit teknis pengampu REDD+, RBP, dan sistem registri karbon
12	ART-TREES	Kesiapan adopsi standar TREES	Kajian kesiapan nasional dan harmonisasi dengan SIS-REDD+
13	Koalisi Pasar Karbon	Sikap Indonesia pada koalisi pasar karbon internasional	Penetapan posisi nasional berbasis kepentingan dan kedaulatan kebijakan
14	AFoCO	Penambahan KT&G selaku mitra penyedia dana sebagai pihak penandatangan PIA sehingga bersifat tripartit	Pertemuan interkem untuk mendapatkan masukan Kemlu dan mereview kembali klausul PIA jika disetujui KT&G sebagai Pihak penandatangan.

Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional dan Pembayaran Kontribusi tahun 2025

Update Daftar Organisasi Internasional (OI) lingkup Kementerian Kehutanan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

No	Focal Point	OI / Konvensi	Kontribusi	Laporan Pemanfaatan	Sumber Pendanaan
1	Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen KSDAE	RAMSAR	CHF 28,336	(√)	DIPA Dit PEBAP (√)
2	Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, Setjen	AFoCO	USD 30,000	(√)	DIPA Kemlu (akan dibayar 2 th 2025-
3	Sekretariat Ditjen KSDAE	IUCN	CHF 45,320	(√)	DIPA Kemlu (X)
4	Direktorat Konservasi Species dan Genetik, Ditjen KSDAE	CITES	USD 35,166	(√)	Dit KSG (Kemenhut) (√)
5	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Ditjen Perhutanan Sosial	INBAR	USD 28,000	X	DIPA Kemlu (X)
6	Direktorat Perencanaan dan Evaluasi DAS, Ditjen PEPDAS	UNCCD	USD 44,803	(√)	DIPA Ditjen PDASRH (√)
7	Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen	ITTO	USD 299,162	(√)	DIPA Kemlu (√)

Keterangan :

(√) : ada/sudah bayar

X : tidak ada/belum bayar

Sebagai tidak lanjut dari Pengalihan Pembayaran Kontribusi OI pada Kemenhut tahun 2026, Biro HKLN telah menyampaikan Nota Dinas kepada Biro Perencanaan No : ND.145/ROKLN/Multilateral/KLN.0/04/2025 tanggal 22 April 2025 untuk mengalokasikan anggaran DIPA Kemenhut TA 2026 untuk pembayaran Kontribusi terhadap 3 (tiga) OI, dengan proyeksi alokasi kontribusinya sebagaimana tabel berikut.

No	Nama OI	Focal Point	Mata Uang	Kontribusi 2025	Estimasi 2026	Kurs	Jumlah (Rp)
1	<i>UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)</i>	Ditjen PDAS RH	Euro	44.803	50.000	19.724	986.200.000
2	<i>Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)</i>	Ditjen KSDAE	USD	35.166	40.000	16.804	672.160.000
3	<i>Ramsar Convention on Wetlands (RAMSAR)</i>	Ditjen KSDAE	CHF	28.336	30.816	21.195	653.145.120
Jumlah							2.311.505.120

Keterangan:

1. Kurs Bank Indonesia per tanggal 2 Januari 2026
2. Estimasi kontribusi tahun 2026 berdasarkan nilai kontribusi tahun sebelumnya

3.2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

3.2.1. KEARSIPAN

Sebagai tindak lanjut Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Kemenhut melakukan kegiatan pengawasan kearsipan internal tahun 2025 di mana Biro HKLN menjadi salah satu unit kerja yang diaudit oleh tim unit pusat kearsipan Biro Umum. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di Biro HKLN, disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar 93,39 (sembilan puluh tiga koma tiga sembilan) dengan kategori “A” (Memuaskan).

Hasil audit kearsipan ini merupakan nilai pertama bagi Biro HKLN setelah Biro Humas dan Biro KLN dilebur. Namun jika dibandingkan dengan angka kearsipan Biro KLN, angka ini meningkat dibanding dengan pencapaian tahun 2022 dengan nilai sebesar 61,10 (enam puluh satu koma satu nol) dengan kategori “B” (Baik), tahun 2023 dengan nilai sebesar 79,84 (tujuh puluh sembilan koma delapan empat) dengan kategori “BB” (Sangat Baik), serta 2024 dengan nilai sebesar 85,18 (delapan puluh lima koma satu delapan) dengan kategori “A” (Memuaskan).



3.2.2. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAN KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan data Monitoring Realisasi Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri (HKLN) Tahun 2025, Biro HKLN mengelola anggaran dengan pagu sebesar Rp. 6.747.612.000. Realisasi anggaran mencapai Rp6.741.570.841 atau sebesar 99,91%, dengan sisa anggaran sebesar Rp6.041.159.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran Biro HKLN telah berjalan efisien dan optimal, serta mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rincian Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase
Layanan Jaringan Informasi Publik	345.000.000	343.972.790	1.027.210	99,70%
Layanan Hubungan Antara Lembaga	1.258.124.000	1.257.647.624	476.376	99,96%
Layanan Informasi Publik	699.199.000	698.846.544	352.456	99,95%
Fasilitas Kerja Sama Internasional	2.195.999.000	2.194.449.917	1.549.083	99,93%
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.249.290.000	2.246.653.339	2.636.061	99,88%
Jumlah	6.747.612.000	6.741.570.841	6.041.159	99,91%

3.2.3. BENCHMARKING

Hubungan dan kerja sama bilateral menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan kerja sama luar negeri tidak hanya untuk meningkatkan pembangunan namun juga sebagai sarana pertukaran pemikiran dan juga pembuka kesempatan ekonomi bagi kedua negara terkait. Oleh karena itu, hubungan bilateral sangatlah penting demi perkembangan negara. Dengan fokus dunia terhadap iklim dan juga green economy membuka jalan bagi Indonesia lewat KLHK untuk membangun kerjasama antar negara.

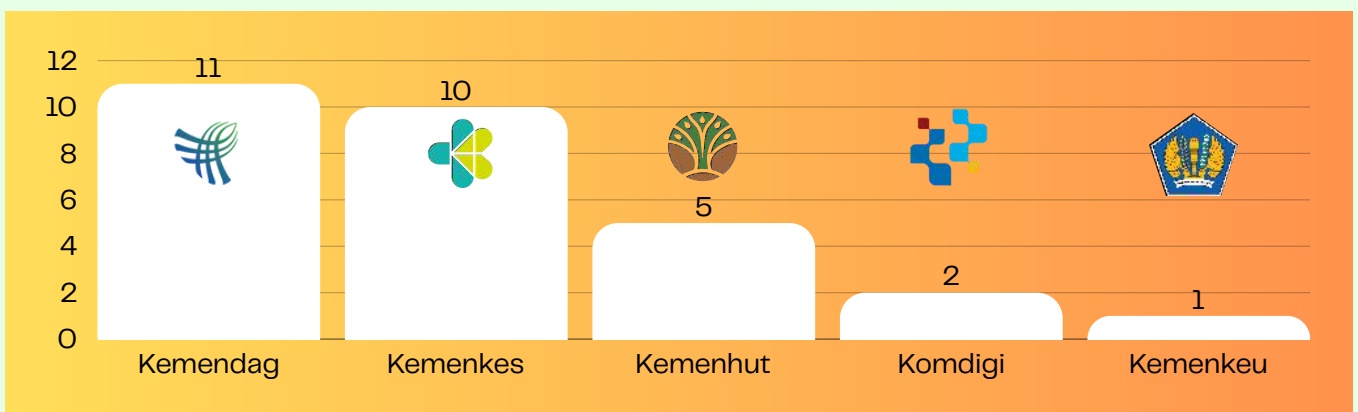
Pada tahun 2025 Kemenhut telah melaksanakan kerjasama bilateral berbentuk penandatanganan perjanjian dengan 5 negara, yakni Australia, UK, Jerman, Perancis, dan Norwegia.

Beberapa kementerian dan badan yang digunakan sebagai perbandingan antara lain sebagai berikut:

- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perdagangan

Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan membuat kerjasama bilateral dengan 2 negara, yakni UAE dan Perancis. Kementerian Perdagangan membuat kerjasama bilateral dengan 11 negara yakni Jepang, Pakistan, Palestina, Chile, Australia, Mozambik, Korea, UAE, Chile, Iran, dan Malaysia. Kementerian Komunikasi dan Digital membuat kerjasama bilateral dengan 1 negara yakni Timor Leste. Kementerian Kesehatan membuat kerjasama bilateral dengan 10 negara yakni Brazil, Amerika Serikat, Swiss, Perancis, Kamboja, Sudan, Zimbabwe, Swedia, dan UAE.

Jumlah negara mitra yang menjalin kerja sama dengan kementerian ini menjadi informasi penting serta refleksi dalam fasilitasi pelaksanaan kerja sama luar negeri untuk kedepannya.



Tabel Benchmarking Kerja Sama antar Kementerian



PENUTUP

PENUTUP

Pada tahun 2025 secara umum capaian kinerja utama Biro HKLN terpenuhi. dari hasil pencapaian kinerja dan anggaran sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan Biro HKLN dalam pelaksanaan hubungan antar lembaga, keprotokolan, penyebarluasan informasi, serta mengkoordinasikan kerja sama luar negeri bidang kehutanan tahun 2025 secara efektif dan konsisten.

Pencapaian tersebut menjadi modalitas bagi pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri pada tahun 2026 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, serta tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.

Pada akhirnya disadari bahwa suksesnya kegiatan hubungan masyarakat dan koordinasi kerja sama luar negeri bidang kehutanan pada para pihak yang terlibat yaitu pemerintah pusat, mitra internasional, nasional dan lokal. Oleh karena itu, hubungan masyarakat dan kerja sama yang baik serta komitmen yang kuat dari semua pihak dibutuhkan dan menjadi modal utama untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kehutanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Biro HKLN Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BIRO HUMAS DAN KLN

Stakeholder dan Customer Perspective

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)		Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1	Meningkatnya layanan hubungan masyarakat dan informasi yang efektif	1.1	Tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan koordinasi kerja sama luar negeri*	3,5 Poin
		1.2	Persentase pemberitaan positif di media massa*	55 Persen
2	Meningkatnya layanan kerja sama luar negeri yang efektif dan efisien	2.1	Kesepakatan kerjasama luar negeri bidang kehutanan*	5 Kesepakatan

Internal Process Perspective

No (1)	Sasaran (2)		Indikator (3)	Target (4)
3	Pengelolaan hubungan antar lembaga dan keprotokolan yang sinergis	3.1	Jumlah kegiatan hubungan antar lembaga dan layanan keprotokolan	100 Kegiatan
4	Peningkatan layanan penyajian informasi publik	4.1	Pemberitaan Positif di Media Massa	4.000 Berita
5	Pelaksanaan hubungan dan Kerja sama luar negeri yang strategis	5.1	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Hubungan dan Kerja sama luar negeri	5 Dokumen

Learning and Growth

No (1)	Sasaran (2)		Indikator (3)	Target (4)
5	Pengembangan Sumber Daya Manusia Biro Humas dan KLN yang Efektif	5.1	Indeks Profesionalitas ASN Biro Humas dan KLN	81-90 Poin
6	Pengelolaan akuntabilitas kinerja Biro Humas dan KLN yang efektif, efisien dan akuntabel	6.1	Nilai SAKIP Biro Humas dan KLN	80 Poin
		6.2	Nilai SPIP Biro Humas dan KLN	3,5 Poin
		6.3	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Humas dan KLN	99%

Keterangan:

* Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Lampiran 2 Tabel Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri baru pada Tahun 2025

No.	Judul Perjanjian	Eselon I	Mitra	Tanggal TTD	Masa Berlaku
1	Implementation Agreement between Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia and GIZ GmbH on Forest and Climate Protection Programme (FORCLIME)	SETJEN	GIZ - JERMAN	30 Januari 2025	3 tahun (2025-2028)
2	Exchange of Letter on First Amendment to the Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia through the Ministry of Environment and Forestry and the Government of the Kingdom of Norway through the Ministry of Climate and Environment on Partnership in Support of Indonesia's Efforts to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Forestry and Other Land Use	SETJEN	NORWEGIA	19 Februari 2025	5 tahun (2025-2030)
3	Declaration of Intent between the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia and for the Minister for the Ecological Transition, Biodiversity, Forest, Marine Affairs and Fisheries of the French Republic in the Field of Sustainable Forestry	SETJEN	PERANCIS	28 Mei 2025	-
4	Implementation of Arrangement between the Ministry Forestry of the Republic of Indonesia and the Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Partnership for Investment in Sustainable Landscapes: Enabling Natural Capital Assets for Folu Net Sink 2030 (KIBAR)	Ditjen PS, dengan IA: Ditjen PS, Ditjen PHL, dan Ditjen KSDAE	FCDO - UK	28 Agustus 2025	2 Tahun (2025-2027)
5	Letter of Arrangement between Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia and The Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation to Support Sustainable Forest Management and Trade in Legally and Sustainably Harvested Forest Product to Reduce Impacts of Climate Change and Biodiversity Loss (MFP-5)	DITJEN PHL	FCDO - UK	28 Agustus 2025	4 Tahun (2025-2029)
6	Cooperation Arrangement between Department of Agriculture, Fisheries and Forestry of the Australian Government and the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia on Forestry	SETJEN	Australia	1 Agustus 2025	Tidak ada masa berlaku

No.	Judul Perjanjian	Eselon I	Mitra	Tanggal TTD	Masa Berlaku
7	Exchange of Letter on Modification of Memorandum of Understanding between the Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom and the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia.	SETJEN	FCDO - UK	28 Mei 2025	7 Tahun (2025-2032)
8	GEF-7 Bamboo project: Protection of Biodiversity and Sustainable Land-use in Conservation Landscapes in South Sulawesi, Gorontalo and East Nusa Tenggara	Ditjen KSDAE	Global Environment Facility (GEF)	27 Februari 2025	7 Tahun (2025-2032)
9	ITTO PP-A/54-331A Promoting Quality Timber Production in Smallholders and Community-based Teak and Other Valuable Species Plantations in the Tropics	Ditjen PHL	International Tropical Timber	10 Maret 2025	1 Tahun (2025-2026)
10	ITTO PD 943/25 (I) Enhancing Legal & Sustainable Supply Chain in Wood Industry to Stimulate Good Forestry Governance	Ditjen PHL	International Tropical Timber	27 Maret 2025; 17 April 2025	1 Tahun (2025-2026)
11	Program kerja sama untuk mendukung konservasi orang utan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia	Ditjen KSDAE	Orangutan Foundation – United Kingdom (OF-UK)	23 Mei 2025 di Jakarta	3 Tahun (2025-2028)
12	Strengthening Capacity for Management of Invasive Alien Species in Indonesia (SMIAS)	Ditjen KSDAE	Food and Agriculture Organization (FAO)	10 Juli 2025 dan 17 Juli 2025	5 Tahun (2025-2030)
13	Strengthening Sustainability in commodity and Food Systems, Land Restoration and Land Use Governance Through Integrated Landscape Management for Multiple Benefits in Indonesia (FOLUR)	EA: Kemenko Pangan IA: Ditjen KSDAE	Food and Agriculture Organization (FAO)	10 Juli 2025 dan 17 Juli 2025	3 Tahun (2025-2028)
14	Program kerja sama untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia	Ditjen KSDAE	Fauna and Flora International (FFI)	26 Agustus 2025 di London dan 4 September 2025 di Jakarta	3 Tahun (2025-2028)

No.	Judul Perjanjian	Eselon I	Mitra	Tanggal TTD	Masa Berlaku
15	MoU between Ministry of Forestry, Republic of Indonesia and International Emissions Trading Association (IETA) on Carbon Market Capacity Building	Setjen	International Emissions Trading Association (IETA)	10 Oktober 2025 di Jakarta dan 25 November di Jenewa	1 Tahun (2025-2026)
16	MoU between Ministry of Forestry, Republic of Indonesia and The Integrity Council for the Voluntary Carbon Markets (ICVCM) concerning Support on High-Integrity Voluntary Carbon Market Development in Indonesia	BP2SDM	The Integrity Council for the Voluntary Carbon Markets (ICVCM)	11 November 2025 di Jakarta dan 9 Desember 2025 di London	2 Tahun (2025-2027)
17	Project Technical Arrangement (PTA) between Ministry of Forestry, Republic of Indonesia and Global Green Growth Institute (GGGI) concerning Nature-Based Solutions for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (Nasclim) Project	EA: Setdit PDASRRH IU: Dit. RM dan Dit. BRPH	Global Green Growth Institute (GGGI)	27 Maret 2025; 17 April 2025	1 Tahun (2025-2026)
18	Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Frankfurt Zoological Society Tentang Konservasi Satwa Liar dan Habitatnya	Ditjen KSDAE	Frankfurt Zoological Society (FZS)	1 Desember 2025 di Frankfurt dan 8 Desember 2025 di Jakarta	3 Tahun (2025-2028)
19	Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Wildlife Conservation Society Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Habitat	Ditjen KSDAE	Wildlife Conservation Society (WCS)	10 Desember 2025	3 Tahun (2025-2028)
20	Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan The Aspinnall Foundation Tentang Konservasi Primata Dilindungi di Indonesia	Ditjen KSDAE	The Aspinnall Foundation (TAF)	17 Desember 2025 di Kent dan 29 Desember 2025 di Jakarta	3 Tahun (2025-2028)

